

No. 152 September - Oktober 2018

BaKTI**News**

www.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



- WELCOME TO THE LAND OF LONG WHITE CLOUD
- JURNALISME BERPERSPEKTIF PEREMPUAN DAN ANAK
- TKD DAN PENGAWAS SEKOLAH SEMANGAT MENGAWAL PROGRAM KTI GURU
- PULAU SUPIORI, INTERNET DI PULAU TERLUAR

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771 979 777 057



BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.bakti.or.id

Editor **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
VICTORIA NGANTUNG
ITA MASITA IBNU

Events at BaKTI **SHERLY HEUMASSE**

Smart Practices
& Info Book **SUMARNI ARIANTO**

Database
Kontak **INDINA ISBACH**

Design & layout
Editor Foto **FRANS GOSALI**

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id SMS BaKTINews** 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201**

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.

BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.

BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000 - 1100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

BaKTI**News** accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTI**News** will edit every article for reasons of space and style. BaKTI**News** does not provide payment to writers for articles.

MENJADI PELANGGAN BaKTI**News** Subscribing to BaKTI**News**

Untuk berlangganan BaKTI**News**, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id.

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTI**News** di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

To subscribe to BaKTI**News** please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id.

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

Daftar Isi


BaKTI News

September - Oktober 2018

No. 152

-
- 1** *Welcome to the Land of Long White Cloud*
Oleh **ANDI ARIFAYANI**
- 4** Selayar, Eksplorasi Kuliner dan Perkampungan di atas batu
Oleh **M.YUSUF WEANDARA**
- 7** Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 11** Menata Ruang dan Wilayah di Papua
Oleh **Drs. ALEX RUMASEB, MM**
- 15** Mengapa Profesi Analis Kebijakan Penting? (Bagian 2)
Oleh **MUGNIAR MARAKARMA**
- 19** Yuliana Siforo di Rimba Asmat
Oleh **PETRUS SUPARDI**
- 23** Satu Peta, Satu Nusantara
- 27** Menangani Anak Rentan dan Berkonflik Hukum
Oleh **ARAFAH**
- 31** TKD dan Pengawas Sekolah Semangat Mengawal Program KIAM Guru
Oleh **MAKHRUS YUSAK**
- 33** Pulau Supiori, Internet di Pulau Terluar
Oleh **N.J. TANGKEPAYUNG**
- 37** BANGGA Papua
- 39** Update Batukarinfo
- 40** Kegiatan di BaKTI
- 41** Info Buku
-

■ Foto Cover : Aditya Rakhmat/Yayasan BaKTI



Masa pertumbuhan anak merupakan masa peniruan atas apa yang di lihat dan dengar. Inilah masa yang amat rentan bagi anak. Faktor lingkungan, sikap orang tua dan keluarga laksana kimia yang kemudian membentuk jiwa dan perilaku anak. Berbagai bentuk kekerasan yang hadir dalam koneksitas itu, kelak akan membentuk anak menjadi pribadi yang mungkin akan menyimpang dari keinginan kita. Jika tak waspada, akan mendorong mereka berkonflik dengan hukum diusia belia.

Foto: Ichsana Djunaed/Yayasan BaKTI

Welcome to the Land of Long White Cloud

Oleh **ANDI ARIFAYANI**

Te aroha (let there be love)

Te whakafono (Let there be faith)

Me te Rangimarie (Let there be peace on earth)

Tatou, tatou e (for every one of us)

Duta Besar New Zealand untuk Indonesia, Trevor Matheson memulai sambutannya dengan menyanyikan salah satu lagu Maori berjudul 'Te Aroha' pada acara *pre-departure training program* Indonesia Selandia Baru Untuk Generasi Muda Inspiratif (INSPIRASI) yang dilaksanakan di Jakarta 19-20 Juni lalu.

Program INSPIRASI atau dikenal juga dengan nama *Indonesia Young Leader Program* (IYLP) adalah program bantuan UnionAID dengan dukungan dari New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia bekerja sama dengan Yayasan BaKTI dan Auckland University of Technology (AUT). Sebanyak delapan orang pemuda dari wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Sulawesi diberangkatkan ke Selandia Baru setelah sebelumnya melalui seleksi berkas, tes dan wawancara.

Pada kegiatan *pre-departure training*, selain bertemu dengan Duta Besar Selandia Baru, peserta program INSPIRASI juga mendapatkan berbagai bekal pengetahuan dasar mengenai kehidupan yang akan dijalani selama mengikuti program ini di Selandia Baru. Pengenalan ini penting karena selama di Selandia Baru, tepatnya di Auckland, masing-masing peserta memiliki *host family* dan tinggal bersama selama



Suasana kampus Auckland University of Technology (AUT) New Zealand, di tempat ini peserta Program INSPIRASI akan belajar selama enam bulan ke depan. Program INSPIRASI adalah program bantuan dari UnionAID dengan dukungan New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia bekerja sama dengan Yayasan BaKTI.

Foto : Dok. Program INSPIRASI

enam bulan. Waktu yang terbilang cukup lama untuk kemungkinan menghadapi *cultural shock*, konflik, *homesick* dan stres.

Dalam kegiatan ini, hadir pula Asisten Deputi Kewirausahaan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Imam Gunawan, yang hari itu memberikan materi tentang Peran dan Daya Saing Pemuda Indonesia di Wilayah Timur. Beliau juga menekankan pentingnya rasa cinta tanah air dan menjadi duta bangsa yang baik selama di Selandia Baru. “Jangan sampai kalian datang ke negeri orang lalu menjelek-jelekan negeri sendiri” pesan beliau diakhir sambutan.

Meski sangat singkat, kegiatan *pre-departure training* ini memberikan pengalaman baru bagi peserta. Tidak hanya belajar teori, kami juga berhasil menjadi tim yang kompak setelah

semalaman berlatih bernyanyi dan menari. Latihan yang akan bermanfaat selama di Selandia Baru sebagai bekal untuk menghadapi acara-acara formal. Beberapa lagu tradisional daerah masing-masing juga sudah dipaparkan meski sesekali harus melihat contekan.

Bertemu Host Family

Kami tiba di Bandara Auckland pada 22 Juni 2018 setelah melalui perjalanan lebih 12 jam dari Jakarta serta transit di Philipina. Setelah melewati *biosecurity* bandara yang terkenal sangat strick, kami disambut oleh Laila Harre, *Project Manager* program INSPIRASI. Pelukan hangat dan sapa yang membuat kami terasa disambut di rumah sendiri.

Selamat datang di negeri *a long white cloud*, kata Laila dalam Bahasa Inggris. Saya sendiri masih takjub dengan berbagai hal baru yang saya lihat melalui kaca mobil Laila. Rasa penasaran lain muncul tentang keluarga yang akan menjadi *host* saya selama 6 bulan ke depan. Apakah saya bisa berbaur? Saya memandangi ujung jilbab yang mulai kusut karena perjalanan panjang. Pasti bisa! Saya memberi semangat pada diri sendiri.

Sebelum berangkat ke New Zealand, kami telah saling kontak melalui email dengan masing-masing *host family* bahkan saling bertukar foto. Beberapa kali kami mencoba menebak seperti apa *host family* berdasarkan cara mereka membalas email. “Kayaknya *host family*ku orang sibuk karena dia balas emailku singkat sekali. Makanya saya masih *clueless*,” salah seorang teman asal Makassar mengungkapkan uneg-unegnya saat *pre-departure training* di Jakarta. Sementara itu teman-teman yang lain sudah tahu banyak tentang *host family* mereka, termasuk kondisi rumah dan jumlah hewan peliharaan mereka.

Kekhawatiran akan menjalani kehidupan yang *awkward* dengan *host family* ternyata tidak (atau belum) terjadi. Tinggal dengan suami istri dan balita berumur dua tahun membuat saya menemukan teman baru. Cara mereka berinteraksi dengan anak serta gender *roles* yang ada di keluarga New Zealand menjadi hal menarik untuk diamati. Meski sering kali saya harus mengucapkan ‘*Pardon? Pardon?*’ saat *host family* saya mulai berbicara dengan cepat ditambah aksen yang kental.

Two Weeks Orientation di Auckland University of Technology (AUT)

Sebagai bagian dari program, peserta INSPIRASI mendapatkan orientasi selama dua pekan pertama, tiga bulan kursus Bahasa Inggris



Foto : Andi Arifayani

dan sisa bulan berikutnya adalah *Sustainable Development Course*. Keseluruhan kegiatan ini akan dilaksanakan di Auckland University of Technology (AUT), kecuali untuk proses *mentoring* program dan beberapa kunjungan ke organisasi yang berhubungan dengan *special interest* masing-masing peserta INSPIRASI.

Pada minggu pertama orientasi, kami diajak berkeliling kampus AUT dan berkenalan dengan staf yang berada di AUT International House. *Bank account*, *Student's card*, kartu perpustakaan, *student concession* (potongan biaya transportasi untuk pelajar) juga diselesaikan dalam dua pekan pertama ini.

Salah satu sesi orientasi kami diberikan materi pengenalan *Sustainable Development Programme Foundations*, *Maori Cultural Awareness*, *Leadership*, *Reflective Journal Writing*, *Setting Goals*, *Infinite Game Workshop* Dan *Outlining Research*.

Pada sesi lainnya, kami dipertemukan dengan narasumber dari Akina Foundation. Organisasi ini bergerak di bidang *social enterprise* dan menjadi partner strategis pemerintah New Zealand dalam pengembangan *sector social enterprise*. Kami diminta menceritakan pengalaman dan ketertarikan kami dalam bidang *social enterprise*. Fauzan, salah satu peserta yang merupakan IT Manager dari tenoon menjadi salah satu peserta paling antusias.

Salah satu pengalaman pada sesi orientasi adalah mengunjungi *Sky Tower* yang merupakan *landmark* kota Auckland. Kami diperkenalkan dengan manajer *Sky Tower* yang ternyata berkebangsaan Indonesia dan sudah lama menetap di kota yang dikenal juga dengan sebutan *city of sail* ini. Jadi tidak usah ditanya bagaimana kami bisa naik ke *Sky Tower* tanpa membayar sepeser pun dan pulang dengan buah tangan berupa cokelat dan tempat lilin bergambar menara *Sky Tower*.

Setelah dua minggu orientasi, saat ini kami sedang memperlancar kemampuan Bahasa Inggris melalui kursus yang akan dijalani selama kurang lebih tiga bulan di AUT International House. Di kursus ini kami akan berbaur dengan teman-teman baru yang berasal dari berbagai negara berbeda dan merasakan atmosfer *multicultural* yang kental. Semoga segala prosesnya berjalan lancar dan bisa kembali ke Indonesia dengan membawa ilmu dan semangat baru serta berkontribusi pada pembangunan Indonesia Timur.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Peserta Program INSPIRASI 2018. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program INSPIRASI dapat menghubungi info@bakti.or.id

Selayar,

Eksplorasi Kuliner dan Perkampungan di Atas Batu

Oleh **M. YUSUF WEANDARA**



Foto-foto : **M. Yusuf Weandara**

Dari Kota Makassar membutuhkan waktu 4 jam menggunakan transportasi roda dua dan 6 jam menggunakan transportasi roda empat. Dengan rute Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba-Bira anda bisa memulainya dengan menggunakan transportasi roda empat (orang-orang biasa menyebutnya Mobil Panther) atau Bis di terminal Malengkeri-Gowa dengan ongkos transport yang bervariasi dari 70-an hingga 80-an ribu. Untuk transportasi roda dua anda bisa searching di Google dengan *key word* “jasa sewa motor Makassar” jika tidak salah ingat ongkos peminjaman dari 50 ribu sampai 100 ribu rupiah per 24 jam.

Jadwal pemberangkatan kapal ferry di Pelabuhan Bira menuju Pelabuhan Pamatata-Selayar sebanyak 2 kali pemberangkatan pertama pukul 09:00 pagi dan pemberangkatan ke dua jam

14:00 sore waktu setempat. Namun bagi anda yang ingin beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan dengan transportasi kapal laut, anda bisa menginap di kawasan wisata Pantai Bira. Di tempat ini ada banyak penginapan dengan tarif 100 ribu sampai jutaan per malam. Selain itu anda bisa berwisata kuliner dan *souvenir* khas Sulawesi di sini. Berbicara mengenai daya tarik, Pantai Bira tidak kalah menariknya dengan pantai-pantai yang pernah anda kunjungi dengan kondisi geografis yang terdiri dari batu karang dan pasir putih tempat ini menjadi tempat yang *perfect* bagi anda pemburu pantai yang eksotik ditambah lagi saat senja tiba, matahari terbenam akan merelaksasi otak anda yang seharian lelah di perjalanan menjadi *fresh* kembali.

Menuju ke Selayar membutuhkan waktu 3 jam perjalanan dengan melewati hamparan lautan tempat pertemuan arus Selat Makassar dan Laut Banda. Dengan biaya penyeberangan 65 ribu

untuk motor tanpa boncengan selebihnya dengan boncengan dan atau menggunakan mobil antara 80 ribu hingga lima ratusan ribu. Sesampainya di Kepulauan Selayar atau tepatnya di Pelabuhan Pamatata anda harus berkendara lagi sekitar 30 menit menuju Kota Benteng, Ibu Kota Kabupaten Selayar.

Senja di Kota Benteng

Bagi anda pengunjung baru anda tidak perlu khawatir sebab di Kota Benteng banyak memiliki fasilitas umum yang bisa anda manfaatkan dan harganya pun tak kalah bersaing dengan tempat-tempat wisata yang pernah anda kunjungi. Tempat menginap misalnya dari kos-kosan hingga hotel dari yang harian hingga bulanan dari yang harga ratusan ribu hingga jutaan. Ada juga warung pojok untuk bersantai dari yang kaki lima hingga *Cafe free Wifi*. Sebaiknya anda memang harus menginap di kota ini satu atau dua hari sebelum ke daerah destinasi anda. Apa yang bisa dinikmati di kota ini? Di pagi hari anda bisa ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) tempatnya bersambungan dengan pelabuhan kapal-kapal kecil jurusan antar pulau di Selayar. Di pelabuhan ini banyak perahu-perahu nelayan tertambat dari yang ukuran kecil hingga yang besar.

Di tempat ini pula Anda dapat melihat berbagai macam jenis ikan dari yang sering Anda makan sampai yang belum pernah Anda liat sekalipun. Ada banyak momen aktifitas nelayan yang bisa Andaabadikan. Bergeser ke selatan ada pasar tradisional yang menjajakan berbagai macam panganan tradisional seperti, keripik melinjo yang rasanya pahit-pahit manis, kacang kenari dengan balutan gula merah yang lezat, kue sarang semut dengan keriu-keriuknya yang manis dan masih banyak lagi jajanan yang lain. Sorenya Anda bisa berburu *sunset* yang indah di kawasan pesisir Selayar sebelah barat. Sambil duduk-duduk menikmati pantai yang di latarbelakangi matahari senja jangan lupa kamera beserta tripodnya agar Anda bisa merekam momen ini dengan maksimal. Setelahnya jangan beranjak pulang dulu, untuk mengusir udara malam yang dingin ada banyak jajanan yang di jual di sepanjang pesisir pantai ini seperti pisang goreng, ubi goreng, sarabba (minuman khas Sulawesi Selatan) dan lain-lain. Habiskan beberapa menit di tempat ini bersama minuman khas Sulawesi sambil menikmati angin pantai yang sepoi-sepoi sebelum Anda beranjak untuk mengisi lambung tengah.

Kampung kuliner adalah tempat yang pas untuk memanjakan lidah Anda dengan menu utama ikan bakar dan nasi santan yang di adu

dengan tiga macam jenis sambal. Sambal tomat dicampur bawang, lombok dan kecap, sambal mangga beserta lombok dan irisan bawang atau sambal yang di blender dengan beberapa bumbu rahasia. Anda mau tau rasanya? datang dan rasakan sendiri. Kampung kuliner adalah kompleks warung makan yang di bangun berdampingan dengan pelabuhan yang ada di kota ini. Lokasinya yang berhadapan langsung dengan laut menjadikan tempat ini salah satu tempat *recommended* di Kota Benteng untuk makan malam. Kampung Kuliner buka saat siang dan malam dengan harga seponsi yang relatif bersaing.

Bissorang Perkampungan di Atas Batu

Apa yang terlintas dipikiran Anda ketika menyebut Selayar, mayoritas akan menyebut Takabonerate. Gugusan pulau yang keindahan bawah lautnya ibarat sepotong pelangi yang jatuh dan pecah berkeping, berhamburan dan menyatu dengan pulau-pulau yang ada di wilayah ini. Namun dibalik itu semua Selayar masih menyimpan kejutan lainnya. Seperti Bissorang perkampungan unik di timur Selayar.

Untuk menuju ke tempat ini membutuhkan waktu kurang lebih satu jam dari Kota Benteng. Mendekati Kampung Bissorang dan jika cuaca tidak sedang berkabut pastinya Anda akan selalu berdecak kagum pasalnya dataran tinggi di lokasi ini menawarkan panorama *landscape* Kota Selayar yang begitu indah. Tidak hanya pemandangan Kota Selayar, di arah utara dan selatan mata Anda akan dimanjakan dengan hamparan hutan dengan topografi yang beragam dengan segala misterinya. Selain itu hamparan laut yang berombak nampak seperti kumpulan kupu-kupu yang berarak pelan mencium bibir pantai.

Memasuki perkampungan ini dari salah satu sudut jalan akan nampak pemukiman warga yang seolah terpisah dengan lereng gunung. Berdiri sendiri di atas batu besar. Atap-atap rumah menjadi penanda satu-satunya bahwa itu adalah pemukiman warga. Saat memasuki perkampungan ini gerbang batu akan menyambut kita. Dulunya batu ini masih utuh, namun untuk alasan memperlancar akses batu ini kemudian dibelah sehingga masyarakat yang akan menuju ataupun yang akan keluar dari perkampungan ini akan lebih mudah.

Kampung Bissorang atau Dusun Bissorang adalah salah satu wilayah yang masuk di Desa Bone Timur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Selayar. Dusun yang memiliki sekitar 20 kepala keluarga ini memiliki satu jalan utama yang sudah di beton jarak antara gerbang dusun dan ujung

dusun (jurang) kurang lebih 200 meter. Di ujung dusun inilah Anda dapat menyaksikan pemandangan Pantai Timur Pulau Selayar.

Bissorang dan Masyarakatnya

Berdasarkan penuturan sejarah dari Petta Raja, Bissorang merupakan salah satu kampung tua yang ada di Selayar. Masyarakat pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, berkebun dan bertani. Untuk nelayan, penangkapan hasil laut masih dilakukan dalam skala kecil dengan menggunakan sampan (perahu dayung dengan kapasitas 3-4 orang, biasanya dilengkapi dengan satu layar). Mereka juga beroperasi hanya di sekitar wilayah pesisir saja. Penangkapan ikan dilakukan pada musim barat, sebab pada musim ini angin kencang yang bertiup dari arah barat akan terhalang oleh pulau Selayar itu sendiri sehingga pantai bagian timur dari pulau ini relatif aman. Saat musim timur tiba saatnya penduduk perkampungan ini beristirahat dari menangkap ikan mereka akan lebih memilih bertani dan berkebun.

Untuk perkebunan dan pertanian, cukup banyak tanaman yang menjadi komoditi andalan di sini seperti kopra, cengkeh, pala, jambu mente, kacang kenari, kemiri dan vanili. Kopra dihargai 5 ribu per kilo, cengkeh kering 150 ribu per kilo yang basah 35 ribu per kilo, pala 35 ribu per kilo, bunga pala 110 ribu per kilo, jambu mente 25 ribu per kilo, kenari 50 ribu per kilo yang belum dikupas 18 ribu, kemiri 23 ribu per kilo, vanili untuk yang kering dihargai sekitar 5 juta per kilo yang basah 510 ribu per kilo. Komoditi-komoditi andalan ini dibeli langsung oleh pengumpul yang kemudian akan membawanya ke Kota Benteng atau ada juga yang langsung membawanya ke Kota Makassar untuk diolah lebih lanjut. Harga beberapa komoditi ini tentu akan berlipat ganda lagi jika pemerintah setempat mau memberikan perhatian yang lebih dengan membuat pabrik pengolahan lanjutan. Kacang kenari misalnya, hasil perkebunan ini sangat digemari tidak hanya oleh masyarakat Sulawesi saja namun masyarakat di berbagai belahan dunia juga sangat menyukainya. Kacang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Belum lagi jika di kolaborasikan dengan *cream* coklat yang nikmat.

Kampung Bissorang dilengkapi dengan genset sebagai sumber penerangannya ada juga yang menggunakan panel surya namun, hanya beberapa orang saja. Siang hari genset tidak beroperasi hanya malam hari itupun hanya malam rabu dan malam minggu. Untuk operasionalnya masyarakat berswadaya dengan cara bergiliran

membeli solar sebagai bahan bakar. Sebenarnya ini genset kedua yang digunakan. Genset pertama sudah rusak terkaman usia dan mungkin juga karena *maintenance* yang tidak berkala.

Untuk air bersih penduduk memperolehnya dari sumur yang berjarak 15 menit jalan kaki namun, ada juga beberapa rumah yang terlihat menggunakan pompa air dan menampungnya di tandon yang terletak di belakang rumah mereka. Air inilah yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari untuk mencuci, memasak dan mandi.

Hanya ada satu sekolah di Bissorang yaitu SD Madrasah Bone Timur. Tadinya sekolah ini terletak agak jauh keluar kampung namun karena polemik kepemilikan lahan, sekolah ini kemudian dipindahkan ke dalam desa. Sekolah ini hanya memiliki dua ruangan satu ruangan digunakan untuk siswa dan satu ruangan untuk guru. Berdasarkan keterangan dari Rajawati salah seorang Guru Honorer, siswa di sekolah ini berjumlah 14 orang terdiri dari kelas I 2 orang, Kelas II 4 orang, Kelas III 4 orang, Kelas IV 2 orang, Kelas V 1 orang dan Kelas VI 1 orang. Untuk tenaga pengajar berjumlah 5 orang termasuk kepala sekolah. Tenaga pengajar ini digaji melalui Dana Bos yang cair 2 kali setahun sebanyak 250 ribu per sekali terima. Sangat jauh dari kata cukup tentunya. Jika masa ujian tiba para siswa akan dibawah ke MAN Aliyah yang terletak di Kota Benteng. Selain bersekolah siswa di sini juga mengaji di sore harinya.

Patut untuk diapresiasi di tengah keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, anak-anak generasi bangsa ini masih giat dan tekun dalam menuntut ilmu, berharap dengan bekal dasar ilmu pengetahuan mereka dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi meraih cita-cita yang selama ini mereka pendam yang selama ini berjuang dengan segala keterbatasan. Patut pula untuk di syukuri bahwa masih ada sosok guru yang rela berjibaku dengan segala kekurangan yang mereka hadapi demi untuk mewujudkan pendidikan yang merata bagi segenap masyarakat Indonesia. Untuk pemerintah, yang ada di daerah hingga yang ada di pusat akan menjadi tamparan keras tentang kondisi pendidikan yang sangat miris dan memprihatinkan ini yang tidak hanya terjadi di daerah Bissorang saja tetapi juga di berbagai daerah di pelosok Indonesia.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi penulis weandaraadar@gmail.com



Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**

Jurnalis dan media bukanlah sesuatu yang berada di ruang hampa yang bebas dari nilai dan berbagai kepentingan.



Foto: Dok. AJI Makassar

Tulisan, berita, foto, dan video tentang perempuan dan anak seringkali menempatkan perempuan dan anak sebagai pihak yang salah dan terhukum.

Perempuan dan anak korban kekerasan, apalagi kekerasan seksual, selain diberitakan secara “terbuka” dengan alasan obyektivitas dan berimbang (*cover both side*), juga tidak jarang memosisikan korban sebagai pihak yang pantas disalahkan dan disajikan secara erotis.

Berita perempuan dan anak sering memuat fakta yang memilukan, sementara di pihak lain, pelaku kekerasan diberitakan sebagai orang yang pantas melakukan kekerasan. Pembaca sering mendapatkan berita mengenai korban kekerasan seksual, yang beritanya memuat korban berpakaian seksi, pulang malam, dan seterusnya. Sementara pelaku kekerasan seksual ditampilkan

sebagai orang yang dalam kesehariannya berperilaku baik. Tentu berita seperti ini menguntungkan, untuk tidak dikatakan membela pelaku.

Jika dikritik, maka si penulis berita akan berargumen bahwa, apa yang disajikan adalah fakta. Mungkin benar, fakta yang terlihat ketika peristiwa kekerasan terjadi. Namun, sebenarnya fakta yang tidak terlihat tidak sesuai dengan kenyataan saat itu. Dengan kata lain, berita yang ditampilkan hanya kejadian saat itu, data dan informasi lain tidak selalu terekspose.

Pengalaman Jurnalis

Pengalaman jurnalis dalam memberitakan perempuan dan anak, adalah hal menarik yang dieksplorasi pada Pelatihan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak dengan menggunakan Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak.



Foto: Dok. AJI Makassar

Umumnya jurnalis ingin membuat berita yang dapat menempatkan perempuan dan anak pada posisi yang lebih manusiawi serta berkontribusi pada perubahan.

Panduan tersebut dibuat atas kerjasama Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) Yayasan BaKTI dengan AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Makassar. Panduan ini dibuat untuk memberikan pemahaman jurnalis, khususnya mengenai mengenai perempuan dan anak.

Pada Pelatihan Jurnalis di Makassar, Ambon, Kendari, dan Parepare, beberapa jurnalis menyatakan bahwa, menulis atau memberitakan perempuan dan anak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama menyajikan fakta dan berimbang. Jika kemudian fakta-fakta tersebut merugikan perempuan dan anak, bukan sesuatu yang diinginkan, dan tidak dapat dikontrol oleh jurnalisnya.

Ada jurnalis yang menulis atau meliput permasalahan perempuan dan anak hanya karena melihat tema tersebut menarik atau seksi, apalagi berhubungan dengan kekerasan seksual. Sisi menarik bisa dilihat dari kepentingan kemanusiaan, namun penyajian tulisan atau berita tidak selalu menempatkan korban sebagai korban yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya.

Contoh, kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh guru, sorotan yang dilakukan jurnalis mungkin positif, karena sebagai pendidik, guru tidak pantas melakukan kekerasan, apalagi menyebabkan luka fisik yang serius. Namun, berita juga menjustifikasi kekerasan fisik sebagai cara mendidik yang dilakukan oleh guru.

Bahwa guru yang melakukan kekerasan adalah guru yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup dalam mendidik atau menjadi seorang pendidik, tidak menjadi sorotan media. Akhirnya, media hanya memberitakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh guru, atau kadang menempatkan anak atau murid sebagai pantas mengalami kekerasan sebagai bentuk hukuman atau didikan. Media belum berkontribusi pada meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga pendidik.

Mengubah Perspektif

Pembuatan panduan dan pelatihan jurnalis adalah bagian dari upaya yang lebih strategis dalam upaya mengubah perspektif jurnalis dalam menulis dan memberitakan perempuan dan anak. Jurnalis dan media tidak cukup hanya menyajikan dan memberitakan sesuatu, dan kebebasan diberikan kepada pembaca dan pemirsa untuk menilai.

Jurnalis dan media bukanlah sesuatu yang berada di ruang hampa yang bebas dari nilai dan berbagai kepentingan. Jurnalis adalah orang yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang menganut nilai-nilai yang sangat patriarki, yang menempatkan perempuan dan anak sebagai manusia kedua dan ketiga. Oleh karena itu, cara bekerja jurnalis dalam meliput dan membuat berita dipengaruhi nilai-nilai yang dianut.

Apabila jurnalis tidak mempunyai perspektif perempuan, anak, gender, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas, maka jurnalis akan memberitakan kelompok-kelompok tersebut sesuai dengan pandangannya yang umum. Bahkan tidak jarang ditemukan berita yang menempatkan kelompok-kelompok minoritas dan marjinal sebagai kelompok pembawa masalah.

Jurnalis untuk Perubahan

Dari empat pelatihan jurnalis yang telah dilaksanakan, yaitu di Makassar, Kendari, Ambon, dan Parepare, ada pesan yang dapat ditangkap bahwa, umumnya jurnalis ingin membuat berita yang dapat menempatkan perempuan dan anak pada posisi yang lebih manusiawi serta berkontribusi pada perubahan. Berita perempuan dan anak tidak sekadar untuk diketahui oleh publik, tetapi juga berujung pada perbaikan kehidupan perempuan dan anak.

Rusdin Tompo, salah satu fasilitator pelatihan, yang juga dikenal sebagai seorang jurnalis senior dan aktivis perlindungan anak, menyatakan bahwa isu perempuan dan anak adalah isu yang selalu tenggelam oleh isu-isu yang lain yang melibatkan tokoh-tokoh besar. Karena itu, menulis dan memberitakan isu perempuan dan anak harus menyajikan hal yang menarik, bernilai lebih, sekaligus memberi sumbangan pada perubahan dan kemajuan.

Sementara Qodriansyah Agam Sofyan, Ketua AJI Makassar, salah satu perumus panduan dan fasilitator pelatihan menilai bahwa, yang paling dibutuhkan jurnalis adalah perspektif dalam melihat perempuan dan anak. Jika perspektif jurnalis sudah terbentuk, maka ditempatkan di manapun dan meliput masalah apapun, pasti akan selalu melihat sisi-sisi lain, seperti perempuan, perlindungan anak, penyandang disabilitas, dan masalah-masalah kemanusiaan lainnya, yang mungkin oleh jurnalis yang lain tidak dianggap penting atau memang tidak mampu melihatnya sebagai seorang jurnalis.

Harapannya, jurnalis yang mengikuti pelatihan ini dapat menjadi jurnalis yang dapat mengubah model pemberitaan yang bias dan menyudutkan perempuan dan anak. Jurnalis diharapkan mengubah kondisi yang buruk yang dialami oleh perempuan dan anak, tentu dengan menggunakan model jurnalisme advokasi dengan perspektif perempuan, anak, dan perspektif hak asasi manusia (HAM).

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program MAMPU BaKTI, hubungi info@bakti.or.id



Menata Ruang dan Wilayah di Papua

Mencari Model
Pembangunan yang
Berkelanjutan untuk
Orang Papua

Oleh **Drs. ALEX RUMASEB, MM**

Papua memiliki kawasan hutan alam utuh terluas di Asia Tenggara (31 juta hektar). Sekitar 84% penduduknya (atau 1,766 juta orang) secara langsung bergantung pada hutan. Sekitar 50% mata pencaharian penduduk Papua bergantung dari apa yang terjadi di kawasan hulu hutan.

Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai USD 6 miliar, kekayaan alam dirasa belum berdampak maksimal pada kualitas hidup Orang Asli Papua (OAP).

Untuk menuju kepada pembangunan berkelanjutan dan tidak mengeksploitasi alam (rendah karbon) adalah dengan membuat satu kebijakan berupa acuan pembangunan lingkungan berkelanjutan yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Papua. Produk hukum ini telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 23/2013.

Melalui Perda RTRW, dalam durasi dua puluh tahun (2013-2033), Pemerintah Papua siap menempuh jalur pembangunan alternatif yaitu, rendah karbon. Tujuan 'Visi 100 tahun' pemerintah Provinsi Papua dan dokumen 'Cetak



Beberapa warga dari salah satu distrik di Papua sedang berjalan melalui sebuah jalan kampung. Aturan RTRW memberikan perhatian pada pelaku pembangunan di Papua, terutama pejabat publik, untuk merencanakan pembangunan dengan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam (hutan) secara bijak dan lestari.

Foto: N.J. Tangkepung/Yayasan BaKTI

Biru untuk Penggunaan Lahan Berkelanjutan' (*sustainable development blue print*) bermaksud mengembangkan model ekonomi yang memberikan pertumbuhan yang setara, berkelanjutan secara ekologis, dan meningkatnya kesejahteraan Orang Asli Papua.

Sebagai ketetapan, produk hukum ini memiliki kekuatan sekaligus keabsahan untuk *punishment* (hukuman), yakni pemberlakuan sanksi hukum bagi penyimpangan RTRW. Semisal perizinan pengelolaan SDA, bukan saja bagi investor yang memiliki izin usaha, namun juga pemberi izin dalam hal ini pemerintah.

Adapun RTRW Provinsi Papua sudah mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu:

- 1** Pertumbuhan yang berjangka panjang dan merata. Mencegah *boom-bust trajectory* seperti yang terjadi pada pembangunan perekonomian yang didasarkan pada ekstraksi sumberdaya alam (ketergantungan sumberdaya alam yang sangat tinggi yang membuat sektor manufaktur menjadi terbelakang, dan pertumbuhan serta tingkat kesejahteraan yang rendah);
- 2** Memenuhi kebutuhan pembangunan dilihat dari kepentingan untuk Orang Asli Papua (OAP) dengan tetap menjaga hutan dan lingkungan di samping mengamankan aset-aset karbon; dan
- 3** Membangun ketahanan jangka panjang untuk menghadapi pengaruh perubahan iklim dan bencana alam.

Aturan RTRW memberikan perhatian pada pelaku pembangunan di Papua, terutama pejabat publik, untuk merencanakan pembangunan dengan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam (hutan) secara bijak dan lestari, juga sekaligus alat proteksi bagi wilayah Papua (hutan dan lingkungan) sekaligus bagi OAP ke masa depan.

Dengan demikian RTRW menjadi sangat penting bagi Papua, karena:

- 1** RTRW Provinsi Papua menetapkan sasaran ambisius penutupan luas hutan di atas 90%. Kemudian mengurangi areal sebesar 21 % yang sebelumnya dialokasikan untuk penebangan terencana.
- 2** Sumberdaya alam Papua amat menggiurkan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri.



Pemandangan alam yang hijau dari salah satu wilayah di Papua. Orang Papua berada pada posisi strategis untuk memberitahu kepada masyarakat dunia tentang bagaimana kesejahteraan umat manusia dapat dimajukan dan dicapai tanpa harus menebang pohon, tetapi dengan cara melindungi hutan.

Foto: Afdhaliya Marifah/Yayasan BaKTI

- 3** RTRW Provinsi Papua sekaligus memberikan kesempatan bagi orang Papua untuk mempertahankan hidupnya di sekitar hutan agar tidak punah ditelan peradaban manusia, juga aset dalam bentuk tanah tidak berpindah tangan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab;
- 4** Hutan Papua merupakan hutan tropis ketiga terbesar setelah Amazon Brazil dan Zaire-Kongo, namun mengalami kerusakan tercepat di dunia sehingga dirasa perlu ada tindakan preventif menjaga hutan;
- 5** Hutan Papua sebagai aset “supermarket alam” memiliki keanekaragaman hayati yang perlu dipertahankan, dipelihara sebagai tempat belajar bagi tujuan jangka panjang untuk semua orang (negara) terutama generasi penerus;
- 6** Hutan Papua merupakan target terakhir pembangunan berkelanjutan dari ekonomi hijau yang sekarang menjadi primadona pembangunan negara-negara maju di seluruh dunia. Papua sedang melakukan lompatan pembangunan (*quantum leap*) dari ekonomi negara berkembang menuju pada pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan;
- 7** Hutan Papua yang masih alami dan lestari, akan membuat arah pembangunan dunia ke depan ditentukan oleh Papua. Papua akan menjadi rujukan pembangunan berkelanjutan dari seluruh negara di dunia. Kearifan lokal akan dipadukan dengan ilmu yang diperoleh anak-anak Papua yang sedang melakukan studi di berbagai negara;
- 8** Solusi pembangunan di Papua yang terus digalakkan untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Pemerintah Daerah dan masyarakat Papua harus siap melakukan perlawanan terhadap berbagai kebijakan yang mengeksploitasi SDA dan mengabaikan keberadaan lingkungan dan OAP.

Belajar dari Nauru

Arah pembangunan Papua dapat belajar dari Nauru, sebuah negeri karang atol di wilayah Pasifik. Nauru merdeka sejak tahun 1968, namun rakyatnya kembali miskin saat kekayaan alamnya habis terkuras.

Selama ribuan tahun pulau ini dihuni oleh burung, sehingga guano (kotoran burung) mengandung fosfat membentuk gunung tinggi.

Komoditi yang harganya lebih mahal dari emas ini, lalu menjadi primadona ekspor Nauru pada periode 1970-an.

Dari hasil penjualan fosfat terutama ke Eropa, menjadikan masyarakat Nauru semakin kaya, dan menerapkan pola dan gaya hidup masyarakat di negara maju. Nauru pun sempat mendapat julukan “Kuwait-nya Pasifik”. Namun saat guano habis, rakyat Nauru kembali kepada kehidupan semula.

Alam pun rusak akibat eksploitasi berlebihan. Bekas pertambangan fosfat meninggalkan daerah tandus dari batu kapur bergerigi yang tingginya bisa mencapai 15 meter. Pertambangan yang berlangsung telah merusak kurang lebih 80% wilayah negara. Sekitar 40% kehidupan laut mati oleh limpasan lumpur dan fosfat.

Apa yang terjadi di Nauru sesuai dengan Teori Ekonomi “*Boom-Bust Trajectory*” (teori balon meledak). Saat suatu wilayah yang memiliki sumberdaya alam yang tak bisa diperbarui dieksploitasi habis-habisan, maka cepat atau lambat manusianya akan mengalami kehidupan yang terdegradasi.

Evaluasi Lima Tahun RTRW Papua

Tahun 2018, Perda RTRW Papua telah berumur lima tahun, dan menurut ketentuan, sudah saatnya melakukan Peninjauan Kembali (PK). Perlu diakui, masih banyak pihak yang belum mengerti terhadap keberadaan RTRW Papua.

Oleh karena itu PK yang dilakukan harus diikuti dengan sosialisasi yang konsisten tentang manfaat sebuah RTRW bagi semua pihak sebagai pemangku kepentingan di Papua.

Proses PK pun harus melihat berapa banyak izin yang sudah dikeluarkan bagi perusahaan besar yang operasinya mengancam kelestarian hutan Papua, berapa banyak area luas hutan yang sudah dieksploitasi dan bertentangan dengan izin diberikan, serta berapa luasan area hutan yang sudah berubah fungsinya.

Tidak kalah pentingnya PK harus menetapkan dengan tegas dan jelas batas-batas wilayah sehingga tidak tumpang tindih batas wilayah antara satu instansi dengan lainnya. Untuk itu peta yang diproduksi untuk dipublikasikan minimal skala 1:10.000.

Hal ini penting untuk menghindari konflik tata batas antar kabupaten dan klaim wilayah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Proses PK perlu merumuskan tindakan sanksi (punishment) terhadap “kesengajaan” yang dibuat sehingga terjadi penyimpangan RTRW.

Visi dan misi Papua ke depan saat itu adalah arah pembangunan di Indonesia akan berubah

terbalik. Ketika industri berat ini beroperasi, Papua akan menjadi daerah penghasil yang mendistribusikan material infrastruktur ke daerah lain di Indonesia. Papua bukan lagi sebagai daerah penerima lagi, Papua akan dibaca sebagai halaman depan, bukan halaman belakang seperti yang terjadi selama ini.

Penutup

Presiden RI, Joko Widodo, merancang sembilan agenda prioritas yang disebut Nawacita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Poin ketiga dari nawacita itu adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa termasuk Papua, dalam kerangka negara kesatuan.

Orang Papua berada pada posisi strategis untuk memberitahu kepada masyarakat dunia tentang bagaimana kesejahteraan umat manusia dapat dimajukan dan dicapai tanpa harus menebang pohon, tetapi dengan cara melindungi hutan.

Pemerintah Provinsi Papua pun harus sungguh-sungguh berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah konkrit. Termasuk, mengalokasikan dana dan sumberdaya secara pasti dengan melibatkan berbagai pihak baik dari dalam maupun luar negeri untuk melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan di Papua, sehingga dapat diwujudkan dengan lebih baik.

Jika tidak dicermati hati-hati, maka pembangunan Papua akan berada pada lintasan pertumbuhan beresiko tinggi, mengikuti jalur provinsi lain lain di Sumatera dan Kalimantan, yang pembangunannya malah menjadi sebab hancurnya sumberdaya alam secara meluas. Orang Papua perlu belajar tidak hanya tergantung pada kekayaan alam, tanpa adanya kemampuan mengelolanya secara baik.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis pernah menjabat sebagai Kepala Bappeda Provinsi Papua. Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Raperdas RTRW Provinsi Papua 2010-2030. Artikel ini merupakan opini pribadi penulis. Artikel ini pernah dimuat di Mongabay dengan tautan [http://www.mongabay.co.id/2018/06/09/lima-tahun-
implementasi-rtrw-mencari-model-pembangunan-yang-berkelanjutan-untuk-orang-papua/](http://www.mongabay.co.id/2018/06/09/lima-tahun-implementasi-rtrw-mencari-model-pembangunan-yang-berkelanjutan-untuk-orang-papua/)



Mengapa Profesi Analisis Kebijakan Penting ? (Bagian 2)

Oleh **MUGNIAR MARAKARMA**

Pada Seminar Pertemuan Berbagi Pengetahuan (*Knowledge Sharing*) Tentang Pentingnya Kebijakan Publik Berbasis Bukti yang Berpihak pada Masyarakat Miskin yang berlangsung di Hotel Melia pada tanggal 5 Juli kemarin, sebuah profesi yang disebut-sebut bersaing pentingnya dengan anggota legislatif dibicarakan. Profesi yang masih tergolong baru tersebut bernama Analisis Kebijakan. Dalam hal ini, tentunya analisis kebijakan yang dimaksud akan mendukung Kebijakan Berbasis Bukti berlaku di negara kita.

Narasumber kedua pada seminar yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerja sama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI), dan Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) ibu Erna Irawati, S.Sos, M.Pol Adm – Kepala Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan-LAN memaparkan peran Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan.

Kenapa membutuhkan birokrasi yang memerankan jabatan fungsional analisis kebijakan? Ibu Erna melontarkan pertanyaan yang kemudian memberikan jawabannya adalah : “Ketika *decision maker* mengambil kebijakan, dia membutuhkan informasi yang relevan, bukti yang



Foto : Mugniar Marakarma

valid. Kalau berbasis bukti, pendekatan tidak 'untung-untungan' karena analisis dibuat berdasarkan data yang bersifat ilmiah, kebenarannya bisa dipastikan. Meskipun ketika diaplikasikan kebenarannya bisa saja memiliki konteks yang berbeda ketika analisis ini dilakukan."

"Namun jika analisis kebijakan yang dilakukan tidak berbasis kepada bukti, saya yakin yang populer itu biasanya apa, ya ... dugaan, tanya ke dukun. Ada untungnya ... kalau untung ya untung banget. Nggak perlu mikir, nggak perlu waktu panjang, tepat waktu. Tapi di pihak lain adalah ketika gagal akan mendapatkan berbagai pertanyaan yang kita sendiri sering sekali tidak bisa menjelaskan 'kenapa saya mengambil keputusan seperti itu'," lanjut Ibu Erna, menjelaskan mengenai perbedaan jika analisis kebijakan dilakukan berbasis bukti atau tidak.

Tergantung konteksnya tetapi berbagai studi menunjukkan kalau kita melakukan analisis kebijakan berbasis bukti, paling tidak prediksi-prediksi di masa depan sudah bisa kita ketahui dengan membaca data yang ada, sehingga implementasinya lebih akurat. Di sisi lain, birokrasi memegang posisi penting sebagai pengambil kebijakan. Inilah pentingnya jabatan

Analisis Kebijakan di sektor publik yang mulai direkrut pada tahun 2015.

Profesi analis kebijakan ini tidak hanya berasal dari Aparat Sipil Negara (ASN). Profesi ini juga berlaku bagi lembaga penelitian, universitas, *think tank*, staf ahli, kepolisian, dan lain-lain bisa bergabung selama syarat kompetensinya terpenuhi. Produksi pengetahuan sangat banyak tetapi apakah produksi pengetahuan ini dapat dimanfaatkan untuk informasi kebijakan? Ini masih menjadi pertanyaan. *Knowledge* dari penelitian yang dilakukan pihak luar, seperti kampus dan NGO sebenarnya juga dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan namun sayangnya belum bisa berkontribusi banyak.

Di sisi lain, bagian Litbang (Penelitian dan Pengembangan) yang berada di dalam lembaga pemerintahan juga belum berkontribusi banyak. Pola hubungan antara penelitian dan analis kebijakan – *research and policy* – ada beberapa. *Research* memproduksi *knowledge*, *policy* seharusnya memanfaatkan *knowledge* ini menjadi informasi kebijakan.

Lebih jauh, Bu Erna memaparkan data mengenai jumlah peneliti 9000 lebih di Indonesia, perekayasa 2000, sementara analisis kebijakan baru 161 orang dan belum ada di Sulawesi Selatan.



Ketertinggalan kita di Indonesia bukan karena sumber daya alam atau teknologi, melainkan karena pengetahuan.

Abdul Madjid Sallatu

LAN – dalam hal ini Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan berusaha menciptakan *network* baik yang memproduksi *knowledge* maupun kebijakan sehingga bisa menciptakan lingkungan kebijakan publik yang lebih bagus. Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan mengambil peran dalam menjembatani antara sektor publik, swasta, perguruan tinggi, dan NGO untuk mendorong terbentuknya kebijakan publik berbasis bukti.

Nah, selain yang dijelaskan oleh Bu Erna, ada juga yang namanya Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia (AAKI). Materi mengenai peran dari asosiasi ini dibawakan oleh Hilarian Ari Wijayatmoko. AAKI didirikan untuk merespon Keputusan Menteri PAN RB Nomor 45/2013 dan di-launching kepada Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, MSi. pada 9 September 2016, sebagai berikut:

- Menciptakan aktor analisis kebijakan di sektor publik untuk menganalisa kebijakan berbasis bukti.
- Menciptakan lingkungan kebijakan yang berbasis bukti.

AAKI merupakan organisasi profesi yang menjadi wadah para analisis kebijakan di Indonesia untuk “bekerjasama” dan untuk mengembang “kapasitas” serta “peran” yang lebih berguna dan berkualitas. AAKI juga menjadi hub kebijakan di Indonesia yang terhubung dengan LAN (Lembaga Administrasi Negara) sebagai instansi pembinaannya, universitas, Litbang, Pemda, *think tank*, staf ahli, LSM/peneliti, dan sebagainya yang mendukung terciptanya kebijakan berbasis bukti.

Turut hadir sebagai narasumber Prof. Dr. Ir. Hj. Winarni Monoarfa, MS mempresentasikan Praktik-Praktik Cerdas dalam Proses Pengambilan Kebijakan di Daerah (Pengalaman Provinsi Gorontalo).

Hal lain yang menarik dari materi ini adalah Ibu Winarni juga seorang akademisi. Biasanya akademisi yang menerapkan pengetahuannya sebagai birokrat biasanya menghasilkan perkembangan yang luar biasa.

Tak salah saya menduga karena pengalaman yang diceritakan Ibu Win, sapaan akrab beliau memang luar biasa. Mulai mengabdikan pada masa pemerintahan gubernur Fadel Muhammad pada tahun 2001, kebijakan berbasis bukti diterapkan di Gorontalo, provinsi yang dulu termasuk terbelakang di Indonesia. Gorontalo awalnya merupakan pemekaran dari provinsi Sulawesi Utara dengan angka kemiskinan pada tahun 2000 sebesar 38% dengan jumlah penduduk sekitar 800.000 jiwa. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Ibu Win selaku Kepala Balitbangda dalam menyelaraskan pemikirannya sebagai doktor dengan birokrat tulen.

Bukan hal yang mudah bergerak dengan APBN dan APBD sebesar masing-masing 150 miliar rupiah dengan sumber daya alam berupa lahan jagung kering seluas 300.000 hektar dan lahan sawah hanya sekira 2000-an hektar

“Kita mencoba dari hulu sampai hilir, bagaimana sebuah kebijakan akhirnya bisa diinternalisasikan di dalam kebijakan berbasis bukti,” Ibu Win memaparkan kerja-kerja yang dilakukannya sehingga terjadi perkembangan. Sekarang angka kemiskinan 17%, sudah banyak berkurang.

Namun diakui oleh Ibu Win, kebijakan tidak harus semuanya berbasis bukti. Berbasis bukti layak diperjuangkan jika berdampak jangka panjang dan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah memiliki Renstra (Rencana Strategi). Beberapa inovasi yang dilakukan Pemda Provinsi Gorontalo contohnya adalah inovasi dalam proses perencanaan dan penganggaran, dalam proses evaluasi, dalam proses pengawasan, kinerja ASN, dan pelaksanaan koordinasi.

Hal menarik juga disampaikan oleh Bapak Robert Endi Jaweng – Direktur Eksekutif KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah). Pak Robert membawakan materi berjudul Riset & Kebijakan Publik: Pengalaman Terbatas KPPOD.

“Kebijakan publik itu proses yang *bottom-up*. Ini pekerjaan besar, tidak boleh patah semangat, dan jangan cengeng. Jalannya *research* itu panjang

dan sering kali ada kontemplasi dan siap untuk bertarung. Kita menghasilkan produk yang berpihak pada masyarakat. Kualitas lembaga riset itu penting. Kita mendorong riset dasar dan aplikatif. Selain itu, harus memahami 'teks kebijakan', dukungan kebijakan, dan kemanfaatan," Pak Robert juga menegaskan mengenai agenda riset yang tidak bersesuaian dengan RPJM dan RPJMD. Hendaknya peneliti juga membaca dokumen negara agar punya "pintu masuk" dalam merealisasikan yang hendak dilakukan dengan pandangan pemerintah.

Bagaimana menghasilkan *Knowledge Based Policy Making* – kebijakan otonomi daerah yang unggul bergantung pada dua unsur pembentuknya, yaitu metodologi dan kapasitas peneliti otonomi daerah. KPPOD lahir sebagai eksperimen kolaborasi multipihak (dunia usaha, komunitas akademik, dan media massa) sebagai tiga pilar masyarakat sipil era reformasi.

Tak kalah pentingnya menurut Pak Robert adalah *intermediary*. Agenda yang didorong tidak hanya memperkuat kapasitas analisis kebijakan tapi juga merupakan penguatan kapasitas Balitbangda (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah). "Balitbang itu tidak sama dengan lembaga riset. Dia bukan produsen pengetahuan. Produsen pengetahuan di lapangan itu seperti lembaga-lembaga studi di kampus," ucap Pak Robert.

Intermediary itu adalah media massa. "Di tingkat nasional, lembaga studinya mau sebegitu apapun, kalau tidak 'bunyi' di media, tidak diperhatikan. Terutama kalau itu riset-riset yang berdampak pada kebijakan politik. Begitu pun DPRD, tidak mengundang kita kalau belum 'bunyi' di media. Memang peran media massa itu sangat penting. Mempengaruhi opini itu sama pentingnya dengan mempengaruhi kebijakan publik, itu kalau di tingkat nasional. Itu faktanya," papar Pak Robert. Menurutnya, hal ini sebagaimana politisi yang banyak tidak memperhatikan soal validitas atau relevansi, melainkan lebih mementingkan popularitas isu. Padahal sebenarnya, bagaimana memaksimalkan kolaborasi dan agar manfaat bisa benar-benar dirasakan oleh yang terdampak oleh kebijakan publik jauh lebih penting.

Pemateri terakhir dari seminar ini adalah Bapak Abdul Madjid Sallatu yang memperkenalkan JiKTI (Jaringan Peneliti KTI) kepada peserta.

"Ketertinggalan kita di Indonesia bukan karena sumber daya alam atau teknologi, melainkan karena pengetahuan," ucap Pak Madjid membuka materinya. BaKTI menginisiasi "Bursa Pertukaran Pengetahuan" untuk hal ini.

JiKTI adalah sub forum dari forum KTI yang difasilitasi oleh BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia). BaKTI mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan yang tersebar dan sekarang mulai mengelolanya. Peneliti JiKTI ada di 12 provinsi KTI, terdiri atas jejaring lebih dari 1000 tetapi bukan merupakan lembaga peneliti.

Sub forum yang lain selain JiKTI adalah Forum Kepala Bappeda KTI yang sudah berlangsung selama 10 tahun. Ini menjadi tempat berkomunikasi anggota-anggota JiKTI di masing-masing provinsi untuk mencoba merumuskan kebijakan yang bisa membantu pemerintah daerah. Realisasi dari *knowledge based policy* di Indonesia Timur adalah melalui pertukaran pengetahuan di BaKTI. JiKTI adalah jejaring kolaborasi penelitian. Selain berkomunikasi dengan Kepala Bappeda, JiKTI juga mengangkat permasalahan di Indonesia Timur untuk dimasukkan ke RPJMN atau yang lainnya. Termasuk dalam Forum Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Melalui Forum JiKTI dan Kepala Bappeda, Forum KTI, memberikan kontribusi dalam penyusunan Buku III RPJMN yang khusus berbicara tentang daerah. Indonesia Timur adalah satu-satunya kawasan yang memiliki afiliasi seperti ini hingga ikut mengisi buku RPJMN. Pak Madjid kemudian menjelaskan langkah-langkah apa yang akan dilakukan JiKTI guna mendukung kompetensi analisis kebijakan di Indonesia Timur.

Menarik, ya. Semoga saja semua daerah makin terbuka untuk mengusahakan analisis kebijakan yang tepat dan berbasis bukti untuk hal yang berdampak panjang bagi kemaslahatan masyarakat. Dibutuhkan komitmen dan kerja nyata, tentunya. Bukan sekadar janji. Selain itu, kesinambungan kebijakan sebelumnya yang telah berhasil dilakukan oleh pemimpin sebelumnya semoga tetap direalisasikan bukannya dimatikan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis dapat dihubungi via email mugniagramarkarma@gmail.com



Yuliana Siforo

di Rimba Asmat

Oleh **PETRUS SUPARDI**

Asmat memiliki daya tarik tersendiri untuk disimak. Hamparan pohon *mangrove* menutupi tanah rawa berlumpur. Di tengah rimba Asmat, tumbuh dan berkembang berbagai jenis flora, seperti gaharu, kayu besi dan berbagai jenis mangrove. Asmat juga menjadi habitat berbagai jenis burung seperti nuri, kakatua, kura-kurang moncong babi dan lain sebagainya.

Orang Asmat berkelimpahan sumberdaya alam. Mereka mengambil kebutuhan makan di dusun. Mereka membangun bivak sebagai tempat berteduh pada saat mencari makanan. Setelah beberapa minggu di bivak dan mendapatkan persediaan makanan yang cukup, mereka akan kembali ke kampung. Begitulah orang Asmat menjalani rutinitas kehidupan setiap hari.



Foto: Petrus Supardi / Yayasan BaKTI

Tahun 1953, Pastor Gerardus Zegward tiba di Asmat. Perjumpaan orang Asmat dengan para misionaris Katolik membawa angin segar perubahan. Pusat-pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan mulai dibuka.

Di belantara Asmat, tepatnya di Kampung Ayam, sudah ada Sekolah Dasar Katolik bernama SD St. Martinus de Pores yang dikelola oleh misi Katolik. Di sekolah ini, seorang putri Asmat, Yuliana Siforo menempuh pendidikan. Ia bersama beberapa temannya bersekolah diasuh oleh para guru yang berasal dari Key seperti Bapak Guru Retoblaut, Guru Soter dari Mimika, Guru Sugito dan Mario dari Jawa serta Guru Mawun dari Muyu.

Kampung Ayam terletak di luar Agats. Perjalanan dari Ayam ke Agats membutuhkan waktu satu hari menggunakan perahu dayung.

Mama Yuliana Siforo di depan gereja St. Martinus de Pores Ayam. Di pemerintahan kampung, mama Yuli menjadi anggota Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kampung Waw Cesau.

“Waktu saya masih kecil, belum ada *long boat* dan *speed* sehingga mesti pakai perahu dayung. Kalau dari Agats ke Ayam bisa satu hari” kenang Yuli.

Meskipun berada di belantara Asmat, Yuli memiliki semangat untuk bersekolah. “Saya anak kampung, tetapi saya sangat ingin bersekolah. Waktu SD saya belajar tekun,” tuturnya.

Pada tahun 1969, Yuli menamatkan pendidikan sekolah dasarnya. Untuk menggapai cita-citanya, ia meneruskan pendidikannya ke SMP YPPK St. Yohanes Pemandi Agats. Di sekolah berasrama inilah, Yuliana tinggal dan merajut masa depannya.

Menjadi Penggerak

Meskipun tidak tamat SMP, Yuli tidak sungkan tampil di kampung. Ia menjadi anggota Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) urusan kesehatan. Di lingkungan Waw Cesau, ia terlibat dalam doa lingkungan dan memimpin paduan suara pada saat Misa di gereja Paroki. “Saya aktif bergereja. Saya tekun berdoa. Karena saya yakin, hanya Tuhan yang bisa menolong saya,” tuturnya. Ia juga selalu mengingatkan warga kampung untuk selalu rajin ke gereja.

Di pemerintahan kampung, Yuli menjadi anggota Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK). “Saya menjadi anggota PKK Kampung Waw Cesau, seksi kesehatan. Kami biasa dapat dana tiga puluh juta. Pada saat kami dapat dana, kami biasa bikin kebun kelompok,” tuturnya. Yuli menuturkan bahwa di kebun PKK, mama-mama menanam sayur sawi, kacang panjang, kasbi, petatas dan pisang.

Setiap hari Yuli tinggal bersama warga lainnya di Kampung Waw Cesau. Ia menyaksikan mama-mama Asmat bekerja keras mulai dari mencuci, memasak, mencari makanan di dusun, melahirkan, menyusui dan membesarkan anak-anak. Ia juga melihat jarak kelahiran yang terlalu dekat. Hatinya tersayat oleh banyaknya ibu hamil yang enggan memeriksakan diri ke Puskesmas Ayam.

“Saya tergerak hati dan mau menjadi kader Posyandu agar bisa ajak ibu hamil untuk pergi periksa. Setiap bulan saya cari dan panggil mereka

“

Saya selalu menasihati anak-anak perempuan Asmat di kampung Waw Cesau supaya mereka menjaga jati diri. Mereka harus sekolah. Mereka harus belajar dan meraih cita-cita. Mereka tidak boleh cepat kawin.

Yuliana Siforo

untuk timbang. Termasuk anak-anak kecil, saya ajak untuk timbang dan periksa kesehatan,” tutur Yuli.

Sejak tahun 2006 Yuli menjadi Ketua Kader Posyandu Kampung Waw Cesau. Ia memberikan perhatian kepada mama-mama Asmat, terutama ibu-ibu hamil, anak-anak Balita.

Yuli mengatakan bahwa sejak Dana Kampung dikururkan ke kampung mulai tahun 2015, setiap tahun Posyandu mendapat Dana Kampung sebesar 20 juta. Dana ini digunakan untuk menyiapkan makanan bergizi bagi anak-anak Balita. “Bahan-bahan makanan bergizi ini semua ada di kampung Waw Cesau seperti ikan, kasbi, petatas dan sayur mayur seperti bayam dan sawi. Kami hanya perlu beli susu dan kacang hijau di Agats” tambahnya.

Selain terlibat di berbagai kegiatan sosial, Yuli memiliki kebun yang dikelola bersama anggota keluarganya. Yuli membentuk kelompok tani, “Jufnam”. “Nama Jufnam itu berasal dari nama mama saya. Kami buka kebun untuk tanam sayur sawi, bayam, dan kangkung. Kami juga tanam kasbi dan petatas serta pisang,” kisah Yuli.

Mengenai pemasaran hasil pertanian, Yuli menjelaskan bahwa dirinya menjual hasil pertanian ke Agats. “Pada saat panen, sayur kami ikat lalu jual satu ikat sepuluh ribu. Sedangkan singkong dan kasbi jual per tumpuk. Saya sendiri yang bawa ke Agats pakai *long boat* milik kampung”, tutur Yuli.



Yuli menjelaskan bahwa uang hasil jualan sebagian disisihkan untuk kelompok dan sebagian lainnya dibagikan ke mama-mama anggota kelompok. “Jadi, saya biasa bilang kepada mereka, bahwa uang hasil kebun yang dijual ke pasar Agats, sebagian disimpan untuk kelompok. Sebagian lainnya untuk mama-mama. Uang kelompok, saya simpan di Credit Union (CU) Ndar Sesepok Keuskupan Agats.

Mengembangkan Kelompok

Kini, di usia senjanya, Yuliana Siforo mengabdikan diri seutuhnya bagi orang Asmat di Kampung Waw Cesau, Distrik Akat, Kabupaten Asmat. Ia setia menjalani tugas rutin berkebun, mengurus Posyandu dan terlibat dalam berbagai kegiatan di Gereja St. Martinus de Pores Ayam.

Yuli tidak berjalan sendiri, Pastor Paroki St. Martinus de Pores Ayam, Pastor Fransiskus Vesto Labi Maing, Pr. senantiasa mendampingi. Berbagai kesulitan yang dihadapi Yuli di dalam



Mama Yuliana Siforo sedang menanam sayuran di belakang rumahnya. Ia selalu mendorong anak-anak Asmat untuk tekun bersekolah dan ibu-ibu hamil harus memeriksakan diri ke Posyandu dan banyak makan sayur.

Foto: Petrus Supardi / Yayasan BaKTI

setiap tugas dan tanggung jawabnya, dikonsultasikan dengan Pastor Vesto. “Kalau saya mengalami kesulitan, saya selalu sampaikan ke Pastor Vesto. Saya minta Pastor Vesto tolong saya. Misalnya, kalau saya tidak ada bibit, saya minta ke Pastor Vesto,” kisahnya.

Yuli masih punya mimpi mengembangkan kelompok tani Jufnam. Dirinya sangat senang tatkala mendapat kabar dari Pastor Vesto bahwa LANDASAN akan mendatangkan Bruder Elias Logo OFM ke Ayam, Distrik Akat untuk melatih petani sayur. “Pastor tunjuk saya yang mengkoordinir kelompok tani yang mau ikut pelatihan. Saya sudah daftar nama-nama”, ungkap Yuli.

Program KOMPAK-LANDASAN II hadir di Distrik Akat sejak April 2018. Pendampingan di kampung, sekolah dasar dan Puskesmas telah berjalan. Sosialisasi HIV-AIDS mulai disampaikan pada saat pertemuan di kampung-kampung. Kini, Yuli masih menunggu kehadiran Bruder Elias

Logo OFM untuk melatih pertanian di Distrik Akat.


Sosok Yuli Siforo menginspirasi kaum perempuan Asmat dalam usaha memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Ia menjadi pelita yang memberi terang di tengah rimba Asmat yang masih berada dalam genggaman kekuasaan kaum laki-laki. Yuli berjuang agar generasi Asmat di masa depan jauh lebih baik dari dirinya dan generasi Asmat saat ini. Ia menyadari bahwa jalan menuju masa depan Asmat yang sejahtera adalah melalui pendidikan bagi anak-anak dan perhatian terhadap ibu hamil dan kaum perempuan. Karena itu, ia selalu mendorong anak-anak Asmat untuk tekun bersekolah dan ibu-ibu hamil harus memeriksakan diri ke Posyandu dan banyak makan sayur.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KOMPAK-LANDASAN II dapat menghubungi info@bakti.or.id



Satu Peta, Satu Nusantara



Kebijakan Satu Peta akan berperan penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan, memudahkan investasi, serta mengantisipasi sengketa pemanfaatan lahan dan konflik perizinan.

Pada Sidang Kabinet Desember 2010, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan data yang berbeda tentang luas hutan lindung Indonesia. Sebabnya: peta dasar yang dijadikan acuan tak sama.

Itu baru satu perkara. Ketiadaan peta yang bisa dijadikan acuan standar nasional bisa punya implikasi yang panjang, mulai dari sengketa lahan, konflik perbatasan antar daerah, hingga pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang. Maka dirancanglah sebuah peta dasar yang disebut Informasi Geospasial (IG), dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai penanggungjawabnya.

Dengan suplai data dan fakta keruangan, termasuk kondisi tematik semacam sosial-ekonomi dan budaya, IG dapat melengkapi data statistik sebagai pijakan pembangunan dan pemanfaatan ruang.

BIG berdiri pada 27 Desember 2011, dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2011. Peraturan Presiden tersebut adalah amanat UU No. 4 Tahun 2011.

Pada tahun 2018, pengumpulan peta dari 19 Kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah di 34 Provinsi telah selesai.

Kehadiran BIG diharapkan dapat menjamin ketersediaan akses terhadap informasi geospasial yang bisa dipertanggungjawabkan; mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang efisien dan efektif melalui kerjasama, koordinasi, intergerasi, dan sinkronisasi; serta mendorong penggunaan informasi geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Melalui kerjasama selama ini, terlihat masih perlu perbaikan dan pembaruan terhadap kondisi dan kualitas data geospasial serta kesepakatan bersama antar Kementerian/Lembaga (K/L) untuk merumuskan upaya penyelesaian terhadap kondisi data geospasial yang saling tumpang tindih. Maka diperlukanlah Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (PKSP). Kunci keberhasilan dari kegiatan ini terletak pada komitmen dari Kementerian/Lembaga yang ditunjuk sebagai walidata yang harus memandang kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta ini sebagai kegiatan prioritas.

“Inisiasi pelaksanaan PKSP akan menjadi momentum besar bagi negara untuk melakukan perbaikan data geospasial di seluruh Indonesia. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam pengambilan kebijakan nasional,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, yang juga Ketua Tim Percepatan Pelaksanaan KSP.

Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin yang sekaligus Ketua Tim Pelaksana KSP menyebut banyaknya peta tematik di Indonesia yang dibuat oleh Kementerian Lembaga berdasarkan peta dasar yang sumbernya beragam telah menimbulkan banyaknya permasalahan. “Terutama untuk proses perencanaan pembangunan secara nasional,” katanya. Sebagai gambaran, banyaknya peta tematik semacam itu kerap menimbulkan tumpang tindih lahan yang kemudian menyebabkan konflik sosial. Selain menghambat pembangunan, konflik semacam itu juga dinilai Hasan menyebabkan terjadinya pemborosan sumber daya alam.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

SATU PETA

- **Menyelesaikan konflik pemanfaatan ruang**
- **Meningkatkan akurasi perizinan pemanfaatan lahan**
- **Memajukan pembangunan yang sensitif terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan**

Diolah dari

“Kebijakan Satu Peta akan berperan penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan, meningkatkan kemudahan berinvestasi, serta menyelesaikan sengketa pemanfaatan lahan dan konflik perizinan,” kata Wahyu Utomo, Deputy Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian.

Diketahui, Kebijakan Satu Peta dilaksanakan dalam tiga kegiatan utama, yaitu

1. Kompilasi-pengumpulan peta tematik;
2. Integerasi-koreksi peta tematik terhadap peta dasar, dan



Meningkatkan koordinasi badan-badan pemerintahan lintas sektor & daerah dalam perencanaan & pemanfaatan ruang



Memberi kepastian investasi & mencegah penyalahgunaan kekayaan alam

“Peta dengan satu standar diharapkan dapat mendorong terwujudnya agenda prioritas pembangunan”

Hasanuddin Z. Abidin,
Kepala Badan Informasi Geospasial



Infografik Artikel tirto.id “Satu Peta Satu Nusantara”

3. Sinkronisasi-penyelesaian permasalahan tumpang tindih antar peta tematik. Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta telah menyelesaikan Kompilasi untuk 82 dari 85 peta tematik (96%) pada 19 Kementerian/Lembaga Wali Data dan Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota di 34 provinsi. 3 peta tematik belum terkompilasi karena belum tersedia secara nasional.

Pada tahun 2018, pengumpulan peta dari 19 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di 34 Provinsi telah selesai. Semua peta tematik yang telah terintegrasi disimpan di laman Geoportal

Kebijakan Satu Peta. Rencananya, bulan ini, Geoportal Kebijakan Satu Peta akan diluncurkan oleh Presiden. Seluruh data dapat diakses oleh semua K/L/D sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kewenangan akses data akan diatur pada Keputusan Presiden atau Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tentang Protokol Berbagai Data Kebijakan Satu Peta.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari tirto.id dan bisa dibaca pada link berikut
www.tirto.id/satu-peta-satu-nusantara-cvAp

Menangani Anak Rentan dan Berkonflik Hukum

Oleh **ARAFAH**

Dalam profil singkat indikator indikator prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang terkait anak untuk Provinsi Sulawesi Selatan, yang disusun oleh BAPPENAS dan UNICEF. Jumlah penduduk berusia anak di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 3 juta orang, atau 35 % dari total penduduk Provinsi Sulawesi Selatan. Besarnya jumlah penduduk usia anak ini, tentu memiliki tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat.

Berbagai bentuk bahaya, ancaman, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan segala perlakuan negatif terhadap anak semakin tinggi. Data dalam Lembar Fakta Pembangunan Bidang Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018, untuk anak berkonflik dengan hukum menunjukkan pada tahun 2017 sebanyak 31% dari semua anak-anak dalam tahanan telah melalui putusan pidana penjara, yang jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebanyak 22%. Terjadi peningkatan

persentase jumlah Anak Berkonflik Dengan Hukum sebanyak rata-rata 3% setiap bulannya pada sembilan Lembaga Pemasyarakatan dan limabelas Rumah Tahanan di Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2015 sebanyak 11 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan melakukan pembinaan di *shelter* bagi 1.650 pekerja anak. Kemudian terdapat 302 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang menangani 24.537 anak. Lebih dari 90% anak-anak ini masih memiliki satu atau kedua orangtua. Dalam masa penanganan, anak-anak ini hidup terpisah dari orangtua maupun lingkungan keluarga. Terdapat 17,4% anak terkena dampak bencana di tahun 2016, seperti puting beliung, banjir, abrasi pantai, pengikisan pemukiman dan pohon tumbang.

Pada tahun 2016 terdapat sebanyak 400 anak jalanan, dengan 333 diantaranya berada di Kota Makassar. Selain itu terdapat sebanyak 10.449 terlantar tanpa orang tua atau diterlantarkan oleh orangtua/keluarga. Angka ini bisa saja berjumlah jauh lebih kecil daripada kondisi sebenarnya





Foto: Arafah / Yayasan BaKTI

Terjadi peningkatan persentase jumlah Anak Berkonflik Dengan Hukum sebanyak rata-rata 3% setiap bulannya.

karena kemungkinan terdapat sejumlah anak yang belum dilaporkan dan tidak tercatat. Butuh keterlibatan berbagai pihak untuk menangani anak rentan dan berkonflik dengan hukum.

Dukungan Pemerintah Kota Makassar

Melalui Program Lembaga Kemitraan, Bappeda Kota Makassar membangun jejaring untuk bahu membahu dalam penanganan anak rentan dan AHK. Berbagai upaya untuk mendorong percepatan penanganan anak rentan dan berkonflik dengan hukum. Bersama UNICEF dan BaKTI, Bappeda Kota Makassar memfasilitasi pertemuan koordinasi dan Sosialisasi. Kegiatan yang difasilitasi antara lain; Pertemuan koordinasi

lintas sektor Pusat kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Kota Makassar, Diseminasi/Sosialisasi Buku Saku dan Buku Panduan Reintegrasi Anak Berkonflik dengan Hukum, Advokasi kebijakan dan anggaran.

BAPPEDA Kota Makassar mengambil peran dalam mensosialisasikan/menyebarkan informasi tentang pentingnya pengembalian anak ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Pada tanggal 13-14 Agustus, BAPPEDA menyelenggarakan sosialisasi buku saku reintegrasi/pengembalian anak berkonflik dengan hukum yang telah selesai masa pembinaan di LAPAS ke lingkungan keluarga dan Masyarakat. Sosialisasi ini melibatkan 200 orang, yang berasal



dari unsur tokoh masyarakat, Ketua RT, tokoh agama dan tokoh pemuda.

Fenomena anak melakukan tindak kriminalitas mengindikasikan kondisi anak yang membutuhkan perhatian yang serius. ketika anak terlibat dalam suatu tindak pidana maka orang tua atau wali anak, serta semua pihak memiliki kewajiban untuk terus mendampingi dalam setiap tahap proses penyelesaian perkara sampai pada saat anak telah menjalani hukuman untuk segera dilakukan Reintegrasi Sosial. Tindakan ini dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan penyadaran pada masyarakat tentang perlunya menerima kembali anak yang pernah berhadapan dengan hukum.

Reintegrasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat dilakukan semua pihak baik Pemerintah maupun NGO/LSM, pekerja sosial, masyarakat agar anak akan bisa lebih berkembang

sesuai dengan hak anak kembali ke lingkungannya hal ini penting dilakukan untuk memperbaiki perilaku anak, agar sesuai dengan norma sosial dan hukum sehingga anak dapat kembali bermasyarakat dan masyarakat bisa menerima AKH sebagaimana masyarakat lainnya.

Penanganan terhadap Anak rentan dan anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama masyarakat dan pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pihak terkait yang terlibat dalam pelayanan anak dan keluarga rentan perlu meyakini bahwa upaya perlindungan anak menuntut keterlibatan dan tanggungjawab berbagai pihak, termasuk masyarakat. Di satu sisi, mereka perlu memahami



Foto: Arifah / Yayasan BaKTI

bahwa lingkungan masyarakat dapat mendukung secara positif tumbuh kembang dan perlindungan anak. Di lain sisi, mereka juga perlu bersikap kritis terhadap faktor-faktor yang ada dalam masyarakat dapat menimbulkan risiko bagi anak untuk mengalami perlakuan salah secara fisik, mental dan atau sosial sehingga membahayakan kehidupan mereka.

Pengakuan terhadap nilai ini memberi tuntunan kepada penyedia layanan untuk memandang masyarakat sebagai sumber pemecahan masalah. Artinya mereka perlu melibatkan partisipasi dan tanggungjawab masyarakat sesuai fungsi dan perannya masing-masing dalam upaya mencegah perlakuan salah terhadap anak serta menyediakan layanan untuk membantu pemenuhan hak anak secara kolektif. Pada saat bersamaan, nilai ini memberi arahan bahwa pekerja sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial

(TSK) masyarakat juga perlu bekerja sama mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan kerentanan atau resiko bagi perlindungan anak.

Pentingnya Komunikasi Positif dalam Lingkungan Keluarga

Komunikasi dan interaksi orang tua dengan anak sangat penting. Sesuai teori interaksionisme simbolik, jika interaksi yang berlangsung antara orang tua dan anak baik, maka pemaknaan anak terhadap orang tua pun akan positif, dan begitupun sebaliknya. Orang tua yang memiliki komunikasi dan interaksi yang hangat dengan anaknya juga memberikan keuntungan bagi orang tua agar bisa membangun komunikasi yang terbuka dan mendeteksi sejak awal jika anak melakukan tindakan yang melanggar norma masyarakat. Komunikasi yang hangat juga efektif untuk memberikan pendidikan nilai-nilai benar yang berlaku di masyarakat agar anak tidak bingung bagaimana tuntutan masyarakat terhadap dirinya sebagai individu.

Selain menjalin komunikasi, pengawasan orang tua terhadap anak juga berperan penting dalam menjaga perilaku anak tetap dalam kewajaran norma. Jika pengawasan dari orang tua dan keluarga terhadap anak lemah, maka hal ini dapat menjadi salah satu penyebab anak melakukan tindakan kriminal, sehingga akan berakibat tingginya angka kriminalitas pada anak (Harianjogja.com, 2014). Untuk menangani AKH, semua pihak harus terlibat aktif dan berkontributif. Jika anak terpaksa menjalani pengadilan, maka dukungan moral dari lingkungan di sekitarnya dan stimulasi yang positif sangat dibutuhkan untuk merehabilitasi perilaku anak menjadi lebih baik. Dengan demikian, antara orang tua dan negara memiliki porsi yang sama untuk bersama menangani rentan dan anak berkonflik dengan hukum. Dukungan keluarga selama anak berkonflik dengan hukum hingga selesai masa hukuman sangat diperlukan oleh anak.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program UNICEF - BaKTI dapat menghubungi info@bakti.or.id

TKD dan Pengawas Sekolah

Semangat Mengawal Program KIAT Guru

Oleh **MAKHRUS YUSAK**

“ Saya sering sampaikan bahwa tunjangan khusus itu kebetulan saja dan tidak melekat seperti gaji. Itu adalah apresiasi yang pembayarannya didasarkan pada kinerja. Tugas guru itu mendidik manusia, jadi janganlah karena nilainya berkurang atau tidak dapat tunjangan lantas semangat mengajar bisa menurun.

Yosephina Osi

Pengawas Sekolah, Kecamatan Lamba Leda
Manggarai Timur.

Dalam pertemuan verifikasi dan penetapan hasil penilaian di Kabupaten Manggarai Timur, Selasa 24 Juli 2018, Ibu Osi menyampaikan pengalamannya saat melakukan uji petik di sekolah Program KIAT Guru untuk berbagi cerita kepada pengawas lain dan peserta pertemuan yang hadir agar bersungguh-sungguh dalam melakukan pembinaan di sekolah, apalagi menurut beliau dampak dari Program KIAT Guru ini sudah mulai terlihat dan dapat dirasakan terutama dalam meningkatkan kehadiran guru di sekolah, ketertiban melaksanakan administrasi sekolah dan meningkatnya kemampuan belajar siswa.

Pertemuan verifikasi dan penetapan hasil penilaian tersebut dipimpin oleh Kabid PTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur, dalam arahnya Pak Matius tersebut menyampaikan bahwa, pada triwulan II untuk penilaian bulan April, Mei dan Juni ini konsistensi sekolah dalam menyampaikan laporan mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Hal ini menurut beliau bisa disebabkan beberapa hal, pertama kami sendiri di Kabupaten ada sedikit *lost control*, adanya PILKADA sehingga kami juga harus menahan diri untuk bergerak, libur sekolah serta para guru ini baru saja di

menerima gaji 13, Tunjangan Profesi, THR serta Kesejahteraan Pegawai sehingga mereka seperti merasa pencairan tunjangan khusus tidak mendesak, ujar beliau sambil tertawa.

“Saya memperoleh laporan dari Operator Kabupaten bahwa ada sekolah yang merekapitulasi hasil penilaiannya tanpa tanda tangan Kepala Desa, mudah-mudahan ini karena kelalaian saja dan bukan karena Kepala Sekolah tersinggung karena nilainya harus mendapat persetujuan Kepala Desa. Tolong ini bapak dan ibu pengawas hal seperti ini di jelaskan kepada sekolah mengapa Kepala Desa harus tanda tangan serta di telusuri apa penyebab sebenarnya tadi”.

“Di Waeratun juga ada guru non PNS ber-NUPTK yang nilainya hanya sekitar 30 % saja karena tidak melaksanakan kesepakatan untuk mengajar pendidikan karakter yang menurut pengawas setelah dilakukan pembinaan ternyata guru yang bersangkutan tidak lagi dapat tunjangan khusus pada tahun 2018. Seharusnya temuan seperti ini dilaporkan oleh pengawas sejak awal sehingga bisa ditelusuri penyebabnya dan bisa ditindaklanjuti” ujar Pak Kabid mengakhiri sambutannya.

“Sementara itu Kabid Sosbud BP3 menyampaikan bahwa pihaknya bersama TKD berencana untuk melakukan kunjungan langsung ke sekolah, namun pada bulan Juli ini masih belum bisa dilakukan karena masih sibuk pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara), mudah-mudahan bulan Agustus nanti bisa kita realisasikan” ungkap Pak Fransiskus mengakhiri sambutannya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan verifikasi penilaian Formulir Layanan Guru (FLG) kepala sekolah yang dipandu oleh Operator KIAT Nilai Kabupaten. Sebelumnya berkas yang penilaian bulanan sekolah yang telah disiapkan diserahkan kepada Pengawas Sekolah, Operator KIAT Nilai kabupaten kemudian menampilkan aplikasi Kiat Nilai dan pengawas membacakan FLG atau FPKG dari masing-masing sekolah sesuai urutan dalam aplikasi Kiat Nilai.



Foto: Dhila Mansyur / Yayasan BaKTI

Peserta yang lain mencermati apakah nilai yang dibaca sesuai dengan nilai yang tercantum dalam aplikasi. Prosesnya dilakukan per kecamatan, mulai bulan April, Mei dan Juni, dan dimulai dari Kecamatan Sambi Rampas, Lamba Leda, Kota Komba, Rana Mese dan Elar. Sementara itu untuk Kecamatan Kota Komba, Rana Mese dan Elar, masing-masing dibacakan oleh Kabid PTK, Kasie Pembinaan Karakter Dikdas dan Bendahara dibantu staf Badan Keuangan. Karena pengawas sekolah dari tiga kecamatan tersebut sedang melakukan supervisi ke sekolah untuk penerapan Kurikulum 13 sehingga tidak bisa hadir.

Di akhir kegiatan Kabid PTK kembali menegaskan bahwa mereka akan kembali menerapkan seperti pada pembayaran tunjangan pada tri wulan dua kemarin, pengiriman laporan hasil penilaian bulanan tidak boleh melebihi tanggal 5 setiap bulannya. Kabid PTK berharap pengawas sekolah dapat lebih aktif mengingatkan sekolah untuk melakukan pertemuan bulanan dan segera mengirimkan laporannya yang sudah lengkap berisi rekap hasil penilaian, surat persetujuan Kepala Sekolah, FLG Kepala Sekolah dan FPKG bagi sekolah kelompok perlakuan dua serta menyerahkan KIAT Nilai kepada operator kabupaten. Nanti Operator Kabupaten juga harus membuat *check list* kelengkapan dokumennya sehingga saat dikirimkan bisa langsung di ketahui kelengkapannya, ujar beliau mengakhiri sambutan.

Sebagai penutupnya Yulianus A. Nggame, Kabid pada Badan Keuangan Daerah berharap

setelah pertemuan verifikasi tri wulan kedua ini, berkas untuk pengajuan pembayarannya segera dilengkapi, sehingga dapat segera diproses oleh Bagian Keuangan Daerah. Dana tunjangan khusus telah diterima sejak 29 Juni sekitar 4 juta rupiah, namun sampai saat ini belum bisa dibuatkan laporannya karena belum tuntas melakukan pembayaran.

Menindaklanjuti hasil pertemuan verifikasi dan penetapan pada hari Selasa 24 Juli 2018 tersebut, pada hari Rabu, 25 Juli 2018 Operator KIAT Nilai Kabupaten menyerahkan Berita Acara Verifikasi dan penetapan hasil penilaian yang sudah di tanda tangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur dan menyerahkan kepada Ibu Efrilianan Nal, Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar serta data guru calon penerima Tunjangan Khusus sudah saya siapkan untuk kemudian dikirimkan kepada bagian keuangan. Semoga esok dari bagian keuangan dapat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) segera sehingga kami bisa segera memulai proses pembayaran Tunjangan Khusus ini segera dan tidak berbenturan dengan waktu pembayaran gaji bulan Agustus”, jelas wanita yang selalu tersenyum tersebut kepada Tim KIAT Guru.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program KIAT Guru, hubungi info@bakti.or.id

Pulau Supiori, Internet di Pulau Terluar

Teks & Foto Oleh **N.J. TANGKEPAYUNG**

Pada bulan Juli 2018 kami mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi Pulau Supiori dalam rangka mensosialisasikan Program Kampung Informasi Teknologi (Kampung IT) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

Pulau Supiori terletak di Barat Laut Pulau Biak, kedua pulau ini sekilas tampak seperti satu pulau bila dilihat pada peta geografi berskala kecil. Keduanya terletak di sisi Utara Pulau Besar Papua (atau Pulau New Guinea bersama negara Papua New Guinea), dipisahkan oleh Selat Sorendiweri dan dihubungkan oleh sebuah jembatan besi sepanjang 100 meter yang membentang di atas selat.

Pulau Kabupaten Terluar

Kabupaten Supiori berada di Pulau Supiori dan Kabupaten Biak Numfor berada di Pulau Biak. Bila melihat peta administrasi Provinsi Papua, maka

Kabupaten Supiori adalah kabupaten terluar yang berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik di Utara dan Kawasan Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih di Selatan. Ibu kota kabupaten terletak di Sorendiweri yang dapat dicapai melalui beberapa alternatif jalur jalan darat sejauh kurang lebih 80 hingga 90 kilometer dari Kota Biak, dimana Bandar Udara Internasional Frans Kaisepo dan Pelabuhan Laut Biak sebagai hub transportasi yang menghubungkan daerah ini dengan daerah lainnya.

Jika akan mengunjungi Supiori dan ingin menikmati pemandangan pesisir pantai sepanjang perjalanan dari Kota Biak (jika waktu tempuh tidak menjadi masalah), maka sebaiknya memilih jalur jalan melalui Biak Utara. Walaupun sedikit lebih jauh tetapi jalur ini menyajikan pemandangan pantai dan dua lokasi wisata alam, yaitu Pantai Batu Pica atau Tanjung Saruri yang menyajikan spot foto pantai berkarang terjal dengan hampasan ombak Samudera Pasifik dan objek wisata Air Terjun Wafsarak di Kampung Amoi

Distrik Warsa. Lokasi air terjun terletak sekitar 150 meter dari jalan Biak-Supiori dan dapat dicapai dengan berjalan kaki.

Supiori adalah kabupaten muda pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2003. Kabupaten yang memiliki spot wisata indah ini luas daratannya 704 kilometer persegi dan luas perairan 6 ribu kilometer persegi berupa pesisir pantai hingga batas lautan lepas. Topografi pulau umumnya bergunung-gunung dan hanya sedikit bagian daratan yang datar di sepanjang daerah pesisir pantai. Pusat perkantoran, pemukiman penduduk dan pasar, serta sarana sosial-ekonomi sebagian besar berada di daerah pesisir yang datar ini.

Pulau Kecil dengan Potensi Alam Besar

Supiori dan pulau-pulau kecil di sekitarnya telah lama dikenal sebagai daerah wisata pesisir dan laut. Hamparan pasir putih dan air laut yang jernih serta karang yang indah di kedalaman lautnya menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun internasional untuk datang. Letaknya yang diapit oleh Samudera Pasifik di Utara dan Kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Selatan menjadi alasan berlimpahnya jenis bernilai ekonomis bagi Supiori, seperti Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*), Tuna Ekor Kuning (*Thunnus albacores*), Cakalang (*Katsuwonus pelamis*), Tongkol (*Auxis thazard*), Tenggiri (*Scomberomorus sp.*), dan jenis ikan pelagis kecil lainnya. Selain itu ada potensi ekonomi dari budidaya perairan laut lainnya seperti budidaya rumput laut dan keramba apung.

Menurut data analisis sistem informasi geospasial (SIG) WWF-Indonesia tahun 2018, sekitar 65% dari luas wilayah Kabupaten Supiori adalah kawasan hutan. Terdiri dari kawasan hutan suaka alam seluas 38.287 Ha, hutan lindung seluas 12.858 Ha, hutan produksi 2.448 Ha, dan areal penggunaan lain seluas 15.954 Ha. Menurut beberapa orang yang pernah berkunjung ke sana, Burung Cenderawasih Kuning (*Paradisea minor*) dan keluarga cenderawasih lainnya dapat kita ditemui di hutan-hutan kawasan konservasi di Supiori.

Memulai Kampung Informasi Teknologi

Kampung IT adalah Program Pemerintah Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dan Program KOMPAK-LANDASAN II. Pendanaannya oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk tahun pertama dan setelah memasuki tahun kedua

pengelolaan program akan diserahkan kepada pemerintah kabupaten sebagai aset daerah.

Pada pertemuan persiapan sosialisasi program Kampung IT yang diadakan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua pada Tanggal 4 Juli 2018, Kepala Dinas Kominfo Ibu Kansiana Salle, SH memberikan arahan bahwa "Sebagai pelaksana teknis dari program ini Dinas Komunikasi dan Informatika akan menyediakan fasilitas jaringan internet yang mandiri dan mudah digunakan bahkan untuk kampung-kampung di pedalaman atau di pulau terjauh dengan tujuan membuka akses informasi melalui internet dan siaran televisi".

Program perintis ini akan diujicobakan pada 14 kampung percontohan di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Keerom, Sarmi, Supiori, Yalimo dan Paniai. Di Supiori yang memiliki 38 kampung, telah dipilih 3 kampung, yaitu Kampung Warfor di Distrik Supiori Timur, Kampung Sorendiwari Distrik Supiori Timur dan Kampung Yamnaisu di Pulau Rani Distrik Kepulauan Aruri sebagai lokasi percontohan bersama 11 kampung lainnya di Provinsi Papua.

Kampung yang menjadi percontohan nantinya akan menerima perangkat alat akses internet yang dapat dioperasikan secara sederhana dari kampung. Selain akses internet, Kampung IT juga akan mendapatkan sebuah kamera DSLR dan satu unit televisi 40 inci yang akan menyajikan siaran televisi dari berbagai *channel* nasional maupun internasional. Menurut Kepala Bidang IT Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jerry A. Yudianto, "Persiapan program ini di lapangan dimulai pada bulan Juli 2018 dan bila semuanya berjalan sesuai rencana maka rencananya akan diluncurkan sekitar bulan Oktober 2018". Tahap pertama dimulai dengan sosialisasi di Kabupaten Keerom, Sarmi dan Supiori.

Sebagai sebuah program kerjasama dukungan pembangunan yang sedang bekerja di 225 kampung di Tanah Papua, program ini akan membantu pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat di lokasi Kampung IT serta peningkatan tata-kelola pemerintahan kampung melalui Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK) yang berjalan di atas sistem internet Kampung IT secara *online* maupun *offline*.

SAIK untuk Kampung di Supiori

SAIK atau Sistem Administrasi dan Informasi Kampung adalah sebuah aplikasi komputer berbasis *web* untuk mengelola data kependudukan, sosial dan ekonomi setiap rumah



Program Kampung Informasi Teknologi akan dapat menjawab keterisolasian daerah seperti di Pulau Supiori, yang beberapa kampungnya tidak terjangkau oleh sinyal telepon.

tangga yang ada di dalam satu kampung. Selain menjadi sebuah pangkalan data, SAIK juga menyimpan *template* administrasi untuk mengurus surat-surat yang dibutuhkan penduduk di tingkat kampung sehingga administrasi kampung menjadi lebih efisien.

Bersama dua orang staf Dinas Komunikasi dan Informasi Papua, kami berangkat dari Sentani Jayapura dengan menumpang Boeing 737-800 Garuda Indonesia dan 50 menit kemudian tiba di Frans Kaisepo di Biak. Perjalanan langsung dilanjutkan menggunakan mobil minibus sewaan yang banyak tersedia di sekitar airport dan dapat disewa per-jam maupun seharian penuh. Perjalanan ke Sorendiweri ibu Kota Supiori

ditempuh dalam 3 jam perjalanan melalui jalur Biak Utara.

Tiba di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Supiori kami disambut kepala dinas Ibu Betty E. Sauyas, S.Sos MM, dan staf yang ternyata sedari tadi telah bersiap untuk mengikuti sosialisasi program Kampung IT.

Wakil Bupati Kabupaten Supiori, Onesias Rumere, S.Sos pada acara sosialisasi ini, atas nama Pemerintah Kabupaten Supiori menyambut baik program Kampung IT dan berharap dinas terkait dapat memanfaatkan program ini bersama kampung dengan maksimal, “saat ini kita sedang mendorong pembangunan sektor pariwisata dan perikanan laut dan dengan hadirnya Kampung IT ini walaupun baru tiga kampung tetapi dapat membantu mempromosikan potensi pariwisata dan perikanan serta sumber daya alam lainnya di Supiori kepada dunia luar, sehingga kunjungan wisatawan dan investasi dapat ditingkatkan”.

Pemaparan program Kampung IT dilakukan oleh Liberina Imbiri, ST dan Victor Aisoki, ST dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua kepada staf dinas terkait di Kabupaten Supiori, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika Supiori, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Kepala Distrik, dan Kepala



Kampung serta sekretaris kampung yang akan menjadi lokasi Kampung IT.

Internet di Kampung

Setelah melakukan sosialisasi di tingkat kabupaten kepada pimpinan daerah dan *stakeholder* dan SKPD terkait, keesokan harinya kami melakukan kunjungan ke tiga kampung yang akan menjadi lokasi Kampung IT di Distrik Supiori Timur dan Distrik Kepulauan Aruri.

Kampung Sorendiwari terletak tepat berbatasan dengan ibu kota Supiori. Kepala Kampung Sorendiwari Bapak Fanuel Imbir merasa akan sangat terbantu terutama dalam hal pendataan warga sebagai informasi monografi kampung. Apalagi dengan kehadiran internet nantinya, kampung dapat mempromosikan potensi dan sumber daya alamnya secara luas. Kepala kampung juga menunjuk dua orang anak muda di kampung sebagai calon Kader Kampung Sorendiwari.

Sekitar satu jam perjalanan dari Sorendiwari ke Warfor, kami disambut Kepala Kampung Bapak Kristomus Sauyas yang kemudian mengajak kami untuk melihat Kantor Kampung dan ruangan yang akan menjadi ruang pelayanan publik Kampung IT. Setelah bercerita panjang lebar tentang

potensi dan tantangan di kampungnya dan mendengarkan kembali tujuan program ini, Kepala kampung dan Bamuskam yang hadir sepakat menunjuk dua kader kampung (yang akan diangkat dengan SK Kampung) sebagai kader kampung yang akan mengelola SAIK dalam Program Kampung IT di Warfor.

Perjalanan kami lanjutkan ke arah Selatan pulau menuju Pelabuhan Korido untuk kemudian menyeberang ke Pulau Rani dimana Kampung Yamnaisu berada. Butuh 30 menit kurang lebih dengan *speedboat* 2 x 40 pk untuk merapat di Pulau Rani yang tampak asri dengan jejeran pohon kelapa yang banyak tumbuh di pulau ini. Kepala kampung Bapak Ferdinand F. Kafiari menerima kami di rumah kediamannya lalu meninjau kantor kampung yang sementara belum difungsikan. Bapak kepala kampung sangat antusias menyambut program ini, beliau bahkan telah menyiapkan nama kader kampungnya dan berencana untuk mempromosikan potensi kampungnya seperti wisata pesisir dan laut serta potensi ekonomis Pulau Rani yang menghasilkan Produk Kopra yang selama ini dijual ke Biak dan daerah sekitarnya.

Gambaran singkat dari perjalanan ini adalah Program Kampung Informasi Teknologi akan dapat menjawab keterisolasian daerah seperti di Pulau Supiori, yang beberapa kampungnya tidak terjangkau oleh sinyal telepon (seluler seperti Kampung Warfor dan Yamnaisu di Pulau Rani). Sebagai proyek percontohan, keberlanjutannya perlu diperhatikan dan hal ini dapat terjadi jika pengguna dalam hal ini kepala kampung dan masyarakatnya merasakan manfaat langsung dalam keseharian mereka. Diintegrasikannya Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK) di dalam Sistem Kampung IT adalah satu langkah untuk memastikan kemanfaatan dan keberlanjutan program perintis ini. Semoga kabar baik pembangunan tidak hanya sebatas jangkauan sinyal telepon selular, tetapi sampai ke mereka yang tinggal di daerah terluar di Republik Indonesia.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KOMPAK - LANDASAN II dapat menghubungi info@bakti.or.id

ALAT KOMUNIKASI UNTUK BANGGA PAPUA

Ragam alat komunikasi yang dibuat oleh tim komunikasi Yayasan BaKTI

LEMBAR BALIK

Dibuat dengan ukuran besar, dan berisi lembaran-lembaran informasi program yang diterjemahkan secara visual. Ditujukan untuk membantu tim sosialisasi program dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Keseluruhan ilustrasinya menggunakan karakter, lansekap alam dan suasana Papua. Ilustrasinya juga mewakili masyarakat Papua di pegunungan dan pesisir.



POSTER



Tim BaKTI mendesain 4 (empat) jenis poster untuk mendukung penyebaran informasi mengenai Program Bangga Papua. Poster akan menyasar tempat-tempat yang strategis seperti kantor desa, kantor distrik, puskesmas, posyandu, pasar, gereja, rumah sakit dan tempat-tempat lain yang beraudiens tinggi. Empat poster tersebut berisi pesan yang berbeda satu sama lainnya.

FILM ANIMASI

Diproduksi dalam dua topik yaitu sosialisasi program dan edukasi penggunaan dana. Keduanya berdurasi 5 menit, menampilkan tokoh-tokoh yang sangat didengar oleh masyarakat Papua seperti tokoh agama, kepala suku, tenaga kesehatan (nakes) yang menyampaikan pesan inti sesuai dengan perannya. Dari karakter tokoh dan masyarakat hingga ilustrasi suasananya mengikuti kondisi lokal Papua. Bahkan bahasa dan dialek Papua pun digunakan.





Dua jenis leaflet didesain. Masing-masing mengenai penjelasan tentang program dan edukasi tentang penggunaan dana Bangga Papua yang benar. Isi leaflet berisi ilustrasi yang sama dengan lembar balik, namun dilengkapi pula dengan teks. Leaflet ini akan memudahkan para penerima manfaat untuk mengingat kembali berbagai informasi mengenai Bangga Papua yang telah dijelaskan sebelumnya oleh tim sosialisasi.

BUKU SAKU

Buku ini berisikan berbagai pertanyaan yang mungkin diajukan oleh calon penerima manfaat atau masyarakat ketika sosialisasi sedang dilakukan. Berbagai pertanyaan tersebut sudah dilengkapi dengan jawaban yang dapat digunakan oleh pelaksana sosialisasi. Karena itu, kartu ini diperuntukkan hanya bagi pelaksana sosialisasi.



MODUL PELATIHAN

Digunakan untuk meningkatkan kapasitas komunikasi anggota sekretariat bersama di tingkat provinsi dan kabupaten serta tokoh kunci yang dianggap penting untuk membantu proses sosialisasi di lapangan.

MODUL PELATIHAN



Artikel

Komitmen TKD Matim Melaksanakan Perbup dan Juknis KIAT Guru

Triwulan dua dan pengumpulan laporan bulan Juli ini cukup memberi pelajaran pada kita, nanti kami akan sampai secara tegas ke Sekolah bahwa mulai penilaian bulan Agustus jika pengiriman laporannya melebihi tanggal 5, kami tidak akan bayarkan tunjangannya, ini kan sudah sesuai dengan Perbup dan Juknis Kita, kata pak Matias Kabid PTK Dinas P & K Manggarai Timur.

Komitmen Kabid PTK tersebut disampaikan setelah beliau melihat perkembangan pengumpulan laporan bulanan sekolah kepada operator KIAT Nilai Kabupaten. Sampai dengan Kemarin, Selasa 7 Agustus 2018 baru 17 sekolah yang sudah mengirimkan KIAT Nilainya ke Kabupaten dan baru 15 sekolah yang laporannya lengkap.

www.batukarinfo.com/kiat-guru/cerita-lapangan/komitmen-tdk-matim-melaksanakan-perbup-dan-juknis-kiat-guru



#CAUSINDY: A Platform for Australian and Indonesian Young Leaders to Create A Stronger Bilateral Relationship

Australia-Indonesia relations had begun since the 17th century, even before European settlement of Australia. Trading contact was established between indigenous communities in Northern Australia and Makassar traders for trepang, or a type of sea cucumber which was considered as a high-valued commodity. The bilateral relations have since emerged, growing, and formalised with Australia's full recognition of the

independence of Indonesia in 1949. Today, the relations have continued to grow and flourished, encompassing a wide range of sectors from security, trade, culture, development, maritime, and so on.

“No two neighbours anywhere in the world are as comprehensively unlike as Australia and Indonesia,” – Former Foreign Minister of Australia, Gareth Evans.

www.batukarinfo.com//komunitas/articles/causindy-platform-australian-and-indonesian-young-leaders-create-stronger

Referensi

Panduan Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Secara Partisipatif dan Responsif Gender



Publikasi ini telah disusun dan dicetak oleh Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dengan dukungan dari Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan Australia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia untuk layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

www.batukarinfo.com/referensi/panduan-penyusunan-peraturan-daerah-inisiatif-dprd-secara-partisipatif-dan-responsif



Kegiatan di BaKTI

1 Agustus 2018

Possible work Training

Komunitas *Possible Hub* bekerja sama dengan Pemerintah Amerika mengadakan pelatihan *soft skill* bagi pemuda lulusan SMA/SMK yang masih menganggur dengan nama *Possible Work Project Training* ini dihadiri langsung oleh perwakilan Pemerintah Amerika dari Career & Technical Education CPS Chicago, Ms. Jennifer Mitchell. *Possible Work Project* adalah salah satu proyek sosial dari komunitas *Possible Hub* yang diinisiasi oleh Nasaruddin (founder) untuk mengurangi angka pengangguran muda, dan merupakan pemenang kompetisi YSEALI Outbound Project oleh American Council dan Departemen Pendidikan & Kebudayaan Amerika Serikat di Washington DC. Kompetisi ini diadakan di akhir tahun 2017 di Amerika, dan diikuti oleh 35 pemuda dari 10



negara ASEAN dalam program YSEALI Professional Fellowship. Sebanyak 20 peserta yang telah diseleksi dari 483 pendaftar mengikuti kegiatan ini. Peserta diberikan pelatihan *soft skill* berupa *English for hospitality*, *Communication skill*, psikologi dunia kerja, *grooming* dan *beauty class*. Program ini selain gratis, para peserta juga langsung wawancara kerja di akhir *training* dengan tujuh perusahaan/hotel yang turut menjadi bagian dari proyek sosial ini yakni Four Points by Sheraton, Melia Hotel, Myko Hotel & Convention Center, Swis-Bellhotel, Gammara Hotel, Harper Hotel, dan Dalton Hotel.

10 Agustus 2018

Kelas Inspirasi BaKTI

“Mengubah Menginspirasi - Cerita Tentang Perubahan”

Yayasan BaKTI menggelar kegiatan Inspirasi BaKTI berupa diskusi buku dari Program MAMPU-BaKTI berjudul 'Mengubah dan Menginspirasi: Cerita tentang Perubahan'. Program MAMPU berfokus pada Pendampingan penguatan perempuan untuk kesejahteraan dan keadilan dengan strategi menguatkan Anggota Parlemen Perempuan. Buku ini berisi informasi mengenai perjalanan program, khususnya capaian-capaian di masyarakat dimana perempuan merupakan tokoh kunci dalam capaian-capaian tersebut.

Diskusi buku ini bertujuan untuk berbagi informasi pengalaman perempuan agar menjadi cerita dan inspirasi bagi perempuan lain untuk membuat perubahan. Hadir sebagai narasumber adalah Alwy Rahman, Akademisi UNHAS dan Husaima Husain, Aktivistik Perempuan dengan moderator Luna Vidya. Beberapa catatan dari diskusi ini yakni buku ini menjadi jembatan untuk mengetahui hal-hal lebih dalam dari sekedar catatan kehidupan orang-orang dan komunitas. Buku ini juga adalah sejarah, dengan pemahaman perempuan hadir dalam diri sendiri dan untuk masyarakat. Perlu perubahan mindset menjadi *mindsight*, yaitu pikiran yang melihat dan nalar yang semakin tajam. Perempuan dengan kemampuan adaptifnya, mampu menggerakkan banyak orang, negara dan siapa saja untuk perubahan positif. Diskusi ini dihadiri oleh 68 peserta berasal dari pemerintah daerah, LSM/CSO, media, akademisi dan masyarakat umum.

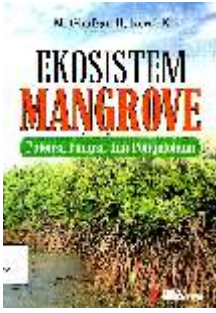


20 Agustus 2018

Diskusi Sistem Zonasi pada Penerimaan Siswa Baru Provinsi Sulsel

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan melalui “RIMA 4in1” (*Research, Innovation, Meeting, and Action Four in One*) yang merupakan Forum *Multi Stakeholder* melaksanakan diskusi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, di kantor BaKTI Makassar. Forum ini terdiri dari pemerintah, akademisi, industri, dan komunitas yang bertujuan sebagai forum bersama dalam mencari solusi dan tindakan nyata dalam menyelesaikan tantangan masyarakat. Tujuan dari kegiatan diskusi ini adalah untuk saling berbagi pengalaman dan menghimpun masukan dari stakeholder yang hadir dalam memberikan tawaran solusi terkait PPDB Sistem Zonasi khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Hadir sebagai narasumber adalah Irman Yasin Limpo - Kepala Diknas Prov Sulsel, Prof. Arismunandar, MPd - Pengamat Pendidikan, Muh Ramli Rahim - Ketua Ikatan Guru Indonesia, Herman Hafid Nessa, SH - Ketua Forum Orang Tua Siswa Kota Makassar dan Niema Palamba, SH, Map - Kadis Dukcapil Kota Makassar. Diskusi dihadiri sebanyak 60 peserta berasal dari Balitbangda kabupaten/kota, Bappeda, Kepala Sekolah, Guru, NGO dan orang tua siswa.





Ekosistem Mangrove: Potensi, Fungsi dan Pengelolaan

PENULIS M. Ghufan H. Kordi K.

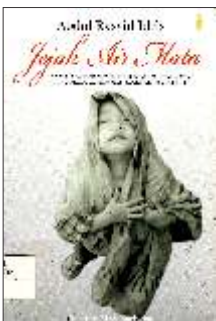
Ekosistem Mangrove merupakan salah satu ekosistem yang khas di daerah tropik yang hanya memiliki luas 3,98% dari seluruh luas hutan di Indonesia. Meskipun memiliki luas yang sedikit, namun hutan Mangrove memiliki banyak fungsi diantaranya penghasil kayu, penghasil detritus dan tempat berlindung berbagai spesies biota perairan payau. Buku ini berisikan informasi mengenai ekosistem Mangrove, potensi ekonomi, kerusakan dan upaya pengelolaannya.



Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur

PENULIS Prof. Dr. Alo Liliweri, M.S

Hidup dalam masyarakat multikultur tidak menjamin interaksi sosial yang sehat. Prasangka bisa sewaktu-waktu muncul dan berpotensi menebar aroma kecurigaan dan sentimen. Untuk itu, diperlukan komunikasi lintas budaya yang mampu mengelola konflik berdasar asas pluralisme dan kesederajatan.



Jejak Air Mata

PENULIS Abdul Rasyid Idris

Jejak Air Mata pada dasarnya mengukuhkan fakta keras tentang pengingkaran atas kesetiaan pada momen-momen kebenaran: anak-anak yang terbunuh melalui kekerasan, terbengkalainya dan semakin mahalnya biaya sekolah bagi anak-anak, kebutakasaan manusia Indonesia yang mencapai dua puluh juta jiwa, terbatasnya manusia Indonesia yang altruis, robeknya ikatan-ikatan sosial di desa-kota, dan runtuhnya kepemimpinan sosial di hampir semua lapisan masyarakat.



Akar Kenabian Sawerigading

PENULIS A.S. Kambie

Bagi masyarakat Bugis-Makassar, Sawerigading merupakan pahlawan legenda. Kehadirannya masih menjadi misteri, bahkan dianggap mitos belaka. Dalam kreativitas berpikirnya, A.S. Kambie mencoba menafsirkan secara subjektif sosok Sawerigading yang dipercayanya bukan hanya mitos namun juga merupakan seorang nabi dengan membedah kepercayaan masyarakat bugis-Makassar pra-Islam yang termaktub dalam Kitab I La Galigo.